



MAJALAH Parlementaria

EDISI 202 • TH. 2021

Pesan Keadilan dari Timur Indonesia



PENGANTAR REDAKSI

MAJALAH Parlementaria edisi 202 mengangkat tema 'Pesan Keadilan dari Timur Indonesia'. Dimana, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Bumi Cenderawasih ini menjadi momentum yang sangat ideal untuk menyatukan anak bangsa. Semua etnis, bahasa dan agama yang ada di nusantara ini menyatu di Bumi Papua.

"Tidak kalah penting, penyelenggaraan PON di Papua dapat kita lihat sebagai simbol persatuan dan kesatuan nasional," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Momentum PON seharusnya memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua. Karena, akan banyak produk kerajinan dan kuliner khas Papua mengemuka di tengah penyelenggaraan PON. Bahkan, pariwisata Papua juga kian dikenal luas. Ekonomi masyarakat Papua pun menggeliat menuju kesejahteraan yang optimal.

Sepanjang penyelenggaraannya, perhelatan olahraga yang dilaungungkan di tengah pandemi ini berlangsung tertib dan aman. Hal ini menandakan bahwasanya masyarakat Papua ingin menunjukkan bahwasanya Papua adalah tanah yang ramah bagi siapa saja. DPR berharap, pasca PON, Papua akan seterusnya aman.

Kemudian di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi menurunkan ulasan terkait dimulainya penghapusan sistem kelas di BPJS Kesehatan. DPR mengingatkan agar itu tidak mengurangi kualitas layanan yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia.

Selanjutnya di Rubrik Anggaran, mengupas tentang postur APBN 2022, DPR mengingatkan agar anggaran negara di tahun mendatang akan menjawab tantangan dalam pemulihan ekonomi. Serta di Rubrik Legislasi, membahas mengenai RUU Landasan Kontinen sebagai upaya memperkuat kedaulatan bangsa.

Masih banyak lagi yang disajikan *Tim Redaksi Parleментарia* seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parleментарia

RALAT: MAJALAH PARLEментарIA EDISI 201

Caption foto hal 48 tertulis Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Seharusnya: Ketua MKD DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



Parleментарia

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S.Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I., Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Geraldii Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita

INFOGRAFIK
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S. Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Parlementaria

EDISI 202 • TH. 2021



10



26



58



72

- | | |
|---|--|
| <p>5 MIMBAR DEMOKRASI
Perjuangkan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Gorontalo</p> <p>6 PROLOG
Pesan Keadilan Dari Timur Indonesia</p> <p>8 LAPORAN UTAMA
Venue PON XX Harus Termanfaatkan</p> <p>10 PON di Papua Bernilai Strategis</p> <p>12 Bukti Pemerataan Pembangunan</p> <p>14 Protokol Kesehatan Super Maksimal</p> <p>16 Apresiasi Tinggi Pada Sektor Keamanan</p> <p>18 SUMBANG SARAN
PON XX Momentum Pembuktian Papua</p> <p>20 PENGAWASAN
Perubahan Skema BPJS Kesehatan Perlu Kajian Komprehensif</p> <p>22 ANGGARAN
Postur APBN 2022 : Harus Mampu Jawab Tantangan Pemulihan Ekonomi</p> <p>26 LEGISLASI
RUU Landasan Kontinen Harus Perkuat Kedaulatan Bangsa</p> <p>28 FOTO BERITA</p> <p>30 PROFIL
Anis Byarwati : "Sang Dosen yang Berjuang di Panggung Politik"</p> | <p>34 KUNKER</p> <p>56 SOROTAN
Perwira TNI dan POLRI jadi PJ Kepala Daerah Jadi Sorotan Publik</p> <p>58 LIPUTAN KHUSUS
Upaya DPR Akhiri Pandemi Melalui Rencana Global SDGs di Forum IPU</p> <p>60 DAPIL</p> <p>70 TOKOH
Pratiwi Noviyanthi : "Berjuang Memanusiakan Manusia"</p> <p>72 PERNIK
Magang di Rumah Rakyat, Mahasiswa Harus Belajar dan Berkembang</p> <p>74 KIAT SEHAT
Pandemi Membaik, Siapkah Kita Berdamai Dengan <i>Long Covid</i>?</p> <p>76 WISATA
Pulau Mansinam : "Jejak Misionaris di Tanah Papua"</p> <p>78 HOBI
Bambang Soesatyo : "Jaga Keseimbangan Hidup dengan Otomotif"</p> <p>79 POJOK PARLE
Pengunjung 'Grasberg' Wajib Lolos Cek Kesehatan</p> |
|---|--|

KEBIJAKAN PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI PASAR TRADISIONAL

Jubir Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan dalam rangka merealisasikan hidup aman dan produktif, pemerintah akan uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah pasar tradisional. Pro dan kontra terjadi karena kesulitan akses, baik dari pedagang maupun pembeli untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kebijakan ini adalah keberlanjutan dari penggunaan aplikasi yang sudah diterapkan di mal dan fasilitas publik lainnya.



Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi



Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone untuk mengunduh PeduliLindungi. Pemerintah harus memikirkan mekanisme lain.

**Ketua DPR RI
Dr. (H.C.) Puan Maharani**

Hak masyarakat tidak boleh terkendala dengan kebijakan pemerintah yang sebenarnya baik untuk memantau pergerakan dan melindungi masyarakat saat melakukan aktivitas

**Guspardi Gaus
F - PAN**

PeduliLindungi masih paling efektif, meskipun kita akui masih ada kekurangan. Tapi sampai saat ini aplikasi tersebut bagus untuk bantu pengendalian Covid-19

**Rahmad Handoyo
F - PDI Perjuangan**

Infografis : Prima Danutirto

Perjuangkan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Gorontalo

Aspirasi dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Meyke Camaru menyambangi DPR RI untuk beraudiensi terkait Program Bedah Rumah dan BSPS di Gorontalo. Kepada Komisi V DPR RI, yang salah satu mitranya yaitu Kementerian PUPR, Meyke Camaru berharap agar kuota dari kedua program tersebut diperbanyak. Mengingat masih tingginya kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady memahami aspirasi tersebut. Ia mengatakan, memang program 'Bedah Rumah' Kementerian PUPR ini memiliki kebutuhan yang tinggi,

namun secara anggaran rendah karena banyak alami refocusing. Dimana, refocusing anggaran ini dalam rangka untuk optimalisasi penanganan pandemi Covid-19 dan sesuai amanat dari UU Nomor 2 tahun 2020.

Meskipun demikian, Hamka menegaskan Komisi V DPR RI akan memperjuangkan aspirasi ini kepada Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran Program BSPS di tahun-tahun mendatang pasca pandemi berakhir.

"Tentu kami berusaha juga untuk menerima aspirasi mereka agar supaya bisa diperjuangkan nanti pada tahun-tahun yang akan datang," ujar Hamka. • rdn/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae didamping para Anggota Komisi V foto bersama usai menerima audiensi dari DPRD Gorontalo



Pesan Keadilan dari Timur Indonesia

Jayapura, 2 Oktober 2021. Stadion Lucas Enembe begemuruh. Lampu warna warni berkilauan, menyembur, menghiasi seisi stadion. Hari itu, Presiden Joko Widodo resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di bumi Papua. Inilah PON pertama di provinsi paling timur Indonesia. PON dengan pesan keadilan yang kuat.



PON XX

mestinya dihelat akhir 2020. Karena infrastruktur venue belum semua rampung dan menyusul kemudian pandemi

Covid-19, akhirnya PON baru bisa diselenggarakan Oktober 2021.

Kini, Papuan punya stadion bertaraf internasional. Setidaknya, ada 44 arena bertaraf internasional. Tentu ini jadi kebanggaan masyarakat Papua. Kelak, stadion ini bisa dimanfaatkan untuk even olahraga internasional selepas PON.

Berlangsung hingga 15 Oktober, PON XX dihelat di tiga kota besar, Jayapura, Mimika, dan Merauke. PON kali ini mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga, dan 681 pertandingan. Ada 2.239 medali yang diperebutkan oleh 7.199 atlet yang berlaga. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat hadir bersama Presiden Jokowi pada pembukaan PON itu, mengapresiasi penyelenggaraan PON pertama di masa pandemi Covid-19.

Katanya, PON kali ini sangat Papua dan sangat Indonesia. PON ini sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bisa melawan pandemi Covid-19. Ini hasil kerja sama yang apik semua kementerian dan lembaga, termasuk BUMN dan swasta. "PON mempersatukan

Indonesia, karena antardaerah berkompetisi dengan semangat menjaga NKRI. Dengan sportivitas, persaingan olahraga justru bisa menguatkan rasa kekeluargaan dan persatuan," tutur Puan.

PON ini selain melibatkan Satgas Covid juga menerjunkan banyak personil TNI/Polri untuk menjaga keamanan Papua. Politisi PDI Perjuangan itu, menilai, penyelenggara sangat rapi dan

indah menata acara. Sementara Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, PON XX ini bisa dijadikan barometer kemajuan Papua. Inilah panggung persatuan dan kebersamaan anak bangsa.

"PON ini menunjukkan kemajuan Papua. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan, panggung kesetaraan, dan panggung keadilan," tandas Presiden. Masih kata Presiden, stadion megah ini bukan satu-satunya bukti fisik kemajuan Papua.

Lebih dari itu, konektivitas laut, darat, udara, konektivitas bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian monumental di tanah Papua. Di sinilah pesan keadilan menyeruak bersamaan dengan perhelatan PON XX. Papua yang dulu terpinggirkan, jauh dari sentuhan pembangunan, kini mendapat perhatian penuh dengan menggelar PON.

Ekonomi Papua mulai menggeliat seakan menemukan jalurnya untuk terus berkembang. Kesejahteraan penduduknya mulai terlihat membaik. Pariwisata Papua kian populer. Infrastruktur terbangun begitu masifnya. Daya beli masyarakat terangkat. Dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi Papua merangkak naik. Berbagai indikator positif ini diharapkan bisa berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat dimintai komentarnya via Whatsapp mengatakan, ini momentum ideal menyatukan anak bangsa lewat perhelatan PON. Semua etnis, bahasa, dan agama di Nusantara menyatu di bumi Papua. "Tidak kalah penting, penyelenggaraan PON di Papua dapat kita lihat sebagai simbol persatuan dan kesatuan nasional," tutur Hetifah.

Tinggal bagaimana menjaga keamanan di Papua terus kondusif, tidak saja setelah PON berakhir, tapi pasca perhelatan PON, Papua tetap

aman dan kondusif. Komisi X DPR sempat menerjunkan tiga tim sekaligus sebelum PON berlangsung untuk melihat dari dekat infrastruktur PON, kesiapan protokol kesehatan, dan aspek keamanan. Hetifah menilai, pemerintah serius menyukseskan dan mengamankan PON XX.

Politisi Partai Golkar itu memandang, PON memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua. Dengan PON ini tentu banyak produk kerajinan dan kuliner khas Papua mengemuka di tengah penyelenggaraan PON. Bahkan, pariwisata Papua juga kian dikenal luas. Ekonomi masyarakat Papua pun menggeliat menuju kesejahteraan yang optimal.

Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X lainnya, Abdul Fikri Faqih menilai, PON kali ini diharapkan jadi ikatan kesatuan NKRI. Setiap provinsi punya hak yang sama dan peluang yang sama dalam menyelenggarakan PON. "Komisi X berharap PON XX ini meraih paling tidak empat sukses, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses ekonomi."

Politisi PKS itu menyerukan agar pasca perhelatan PON, semua sarana dan prasarana (sarpras) bisa terawat dan dimanfaatkan dengan baik. Dan ke depan, Papua bisa menjadi provinsi olahraga. Fikri melihat, sarpras olahraga Papua sangat layak. Bahkan, lembaga internasional menilai stadion indoors dan aquatik sudah berstandar internasional.

Akhirnya, pada 15 Oktober lalu, PON XX ditutup oleh Wakil Presiden K.H. Maruf Amin. Provinsi Jawa Barat jadi kampiun dengan meraih 103 emas. Disusul DKI Jakarta 110 emas (91 perak), Jawa Timur 110 emas (89 perak), Papua 93 emas, dan Bali 28 emas. "Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, Tanah Papua, berlangsung dengan sukses. Torang Bisa! Ini bukan hanya semboyan tetapi nyata dan terbukti," sambut Wapres. ● mh/es



Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan venue PON X Papua. Foto: Eno/mf

Venue PON XX Harus Termanfaatkan

PON merupakan pesta olahraga nasional yang diadakan setiap empat tahun diikuti seluruh provinsi di Indonesia. PON tahun ini menjadi kejuaraan multieven nasional ke-20 dan akan dilaksanakan di Provinsi Papua, yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.



DALAM perhelatan PON tahun ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani hadir mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan

venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Ia berharap agar berbagai arena tempat berlangsungnya PON

terus dirawat pasca event olahraga nasional itu.

Peresmian venue PON XX secara simbolis dilakukan di Gedung Istora Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Pembangunan fasilitas olahraga dalam rangka pelaksanaan PON di Provinsi Papua akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua," kata Puan.

Dia juga mengingatkan agar seluruh venue PON harus mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi

rakyat. Puan mengharapkan, jangan sampai pembangunan dengan nilai yang besar menjadi sia-sia dan hanya digunakan saat PON berlangsung. "Pasca-perhelatan PON seluruh fasilitas olah raga yang dibangun dengan triliun-an rupiah uang rakyat ini, harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Papua," tegasnya.

Bukan tanpa alasan Puan mengingatkan hal tersebut. Sebab selama ini banyak venue yang dibangun untuk pelaksanaan PON, pada akhirnya kurang dimanfaatkan setelah pesta olahraga empat tahunan itu berakhir. Belajar dari pengalaman sebelumnya di provinsi lain, pasca-pelaksanaan PON, fasilitas olahraga yang dibangun itu hanya menjadi saksi bisu perhelatan PON.

"Setelah itu kondisinya terbengkalai dan tidak terawat, bahkan menjadi beban bagi pemerintah daerah setempat karena tingginya biaya pemeliharaan fasilitas tersebut," Papar Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ada 7 venue PON XX yang diresmikan Presiden Jokowi, yaitu Arena Akuatik, Arena Panahan yang berada di Istora Papua Bangkit. Kemudian Arena Cricket dan Arena Hoki (outdoor-indoor) di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya Arena Sepatu Roda di Bumi Perkemahan Waena, Kota Jayapura dan Arena Dayung di Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Pembangunan di 7 lokasi tersebut menggunakan APBN.

“Berbagai lokasi olahraga ini kita harapkan juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Puan.

Berdirinya berbagai arena perhelatan PON bukan sekadar membangun fasilitas olahraga baru di Papua. Menurut Puan, infrastruktur olahraga di sejumlah daerah di Provinsi Papua itu juga sebagai upaya membangun semangat persatuan kebangsaan Indonesia. “Karena acara olahraga seperti PON turut menguatkan rasa persaudaraan kita,” tuturnya.

PAPUA YOUTH CREATIVE HUB

Setelah peresmian venue PON XX Papua, Puan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peletakan batu pertama *Papua Youth Creative Hub*. Ia pun yakin wadah yang disiapkan untuk menghimpun sumber daya manusia muda berprestasi asal Papua itu akan membawa kemajuan bagi Bumi Cenderawasih.

Groundbreaking Papua Youth Creative Hub di Abepura, Jayapura, dilakukan Presiden Jokowi pada Sabtu (2/10). “Kita percepat proses agar Papua menjadi tempat lahir energi besar kemajuan,” kata Puan usai peletakan batu pertama *Papua Youth Creative Hub*.

Dia juga mengatakan, Papua harus menjadi tempat lahir inovasi, bukan hanya sebagai pengguna inovasi dari tempat lain. Puan berharap Papua akan semakin maju. “Papua menjadi tempat lahirnya kemajuan, bukan hanya penerima hasil dari kemajuan,” tuturnya.

Papua Youth Creative Hub sendiri dibangun sebagai wadah yang akan memfasilitasi SDM unggul Papua dari berbagai lintas disiplin ilmu pengetahuan. Program Papua Muda Inspiratif tersebut diharapkan mendukung perwujudan visi dan misi pengembangan pemuda pemudi Papua dan Papua Barat dalam bidang *culinary dan hospitality*, riset, teknologi, kewirausahaan, industri kreatif dan digital, pendidikan dan literasi, kesehatan dan kecantikan, serta budaya dan bahasa.

Di *Papua Youth Creative Hub*

nantinya akan dibangun *co-working space*, ruang teknologi pembelajaran digital, ruang konser, ruang inovasi produk, asrama, hingga fasilitas olahraga. Puan pun mendukung wadah ini menjadi pusat pengembangan kreativitas dan bisnis *startup* di Papua. “Kita *kickstart*, memulai dengan cepat lahirnya *startup-startup* atau rintisan baru dari Papua yang menghadirkan kemajuan bagi Indonesia dan bahkan dunia,” ujar Puan.

Di dalam program ini juga nantinya akan diselenggarakan berbagai kegiatan. Bentuk kegiatannya berupa pengembangan diri untuk melengkapi keahlian berbisnis, termasuk *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan dasar-dasar manajemen.

“Papua selain terkenal keindahan dan kekayaan alamnya, kita harapkan juga akan semakin terkenal dengan kemajuan kreativitas anak-anak mudanya dengan adanya *Papua Youth Creative Hub* ini. Maka ekosistem kreativitas pemuda Papua harus terus dibangun dan dibina,” ungkap Puan.

Program *Papua Youth Creative Hub* menjadi bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Puan berharap pembangunan *Papua Youth Creative Hub* yang 60 persen di antaranya berupa lahan hijau akan membawa banyak manfaat bagi seluruh masyarakat Papua. “Saya berharap agar program ini dapat berkontribusi untuk menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan,” ungkap Puan.

Target pelaksanaan pembangunannya mulai dari September 2021 hingga Desember 2022. Alokasi pembiayaannya senilai Rp95 miliar. “Program *Papua Youth Creative Hub* harus terus didukung oleh seluruh elemen bangsa dan dilakukan secara bergotong royong sehingga SDM unggul Papua terus bertumbuh serta turut berpartisipasi menjadikan Indonesia semakin hebat,” tutup Puan.

● eko/es

PAPUA SELAIN TERKENAL KEINDAHAN DAN KEKAYAAN ALAMNYA, KITA HARAPKAN JUGA AKAN SEMAKIN TERKENAL DENGAN KEMAJUAN KREATIVITAS ANAK-ANAK MUDANYA DENGAN ADANYA PAPUA YOUTH CREATIVE HUB INI. MAKA EKOSISTEM KREATIVITAS PEMUDA PAPUA HARUS TERUS DIBANGUN DAN DIBINA.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/mf

PON di Papua Bernilai Strategis

Komisi X DPR RI menghadiri penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua yang sedianya dilaksanakan tahun 2020 yang lalu, tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19.



PELAKSANAAN
PON XX tahun 2021 ini, menjadi sangat penting, selain untuk menjaga kelanjutan prestasi atlet nasional

maupun atlet daerah, PON Papua juga diharapkan menjadi momentum bagi terjaganya kondisi kesehatan dan kebugaran warga.

Bagi Komisi X DPR RI, kesuksesan PON di Jayapura, Mimika dan Merauke,

sangat penting bagi terselenggaranya *sport for all* dan proses pembibitan atlet. PON tahun ini merupakan kejuaraan multievent nasional ke-20. Perwakilan Anggota Komisi X yang menghadiri sekaligus mengawasi penyelenggaraan PON di Papua antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifah, Dewi Coryati, dan Illiza Saaduddin Djamal.

Menurut Komisi X DPR RI, penyelenggaraan PON XX ini memiliki nilai strategis dari sisi percepatan

pembangunan di wilayah Provinsi Papua, dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.

WUJUDKAN EMPAT SUKSES

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengharapkan penyelenggaraan PON XX bisa meraih paling tidak Empat sukses; sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi dan sukses ekonomi. Serta berharap pasca perhelatan semua sarana prasarana ini bisa terawat dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga menjadikan Papua sebagai Provinsi Olahraga.

Dari sisi sosial-budaya, akan terjadi interaksi sosial yang masif, di mana



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (kiri) saat meninjau venue Aquatic, Papua. Foto: Ridwan/nvl

masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua.

Sebelum pandemi melanda seluruh wilayah di Indonesia, Komisi X DPR RI pernah membentuk Panja Persiapan PON XX di Papua. Panja Persiapan PON Papua, merekomendasikan 11 rekomendasi terkait beberapa sukses yang harus diraih, terutama sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PON XX juga wajib menargetkan sukses administrasi tanpa meninggalkan masalah hukum, sukses ekonomi bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan momen PON XX sebagai pembangkit peningkatan ekonomi masyarakat, sukses memasyarakatkan olahraga terutama dalam mencegah kembali meluasnya pandemi Covid-19.

“Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PON XX juga wajib menargetkan sukses administrasi tanpa meninggalkan masalah hukum, sukses ekonomi bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan momen PON XX sebagai pembangkit peningkatan ekonomi masyarakat, sukses memasyarakatkan olahraga terutama dalam mencegah kembali meluasnya pandemi Covid-19,” papar Fikri.

Selanjutnya adalah sukses pasca-even, yaitu dengan pengelolaan venue-venue pertandingan pasca penyelenggaraan PON XX 2020, sehingga infrastruktur olahraga yang telah terbangun tidak terbelengkalai dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan olahraga di daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan, pihaknya senantiasa menargetkan even ini sukses. Untuk itu pihaknya kerap melakukan komunikasi intens,



Komisi X DPR RI saat menghadiri pembukaan PON XX di Papua. Foto: EKO/mv

menggal dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan penyelenggaraan PON XX Papua, seperti pemda, PB PON XX, Panitia PON XX Derah Papua.

Dia mengungkapkan, Pada tanggal 10-12 September 2021, Komisi X DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik persiapan PON XX DPR RI di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika, dan pada tanggal 21 September 2021 menerima audiensi Anggota Tim Pansus PON XX DPRD Provinsi Papua. “Dari dua kegiatan pengawasan di atas, Komisi X DPR RI menemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam persiapan,” ungkap Agustina.

Dia memaparkan, ada keterlambatan pencairan anggaran untuk, konsumsi, akomodasi, transportasi, honor gaji dan lain-lain sebesar Rp.1,4 triliun dari Pemerintah Pusat. Selain itu ada kendala pengadaan atribut sosialisasi penyelenggaraan PON XX Papua seperti spanduk dan baliho pendukung sosialisasi PON di Mimika.

Tak hanya itu, untuk menghadirkan produk-produk kreatif seperti *merchandise* atau buah tangan kreatif PON XX Papua juga terkendala, karena minimnya fasilitas dan sumber daya

manusia. Dan yang terahir adalah belum tercapainya target vaksinasi bagi 231.863 warga Kota Jayapura.

AJANG PEMBIBITAN ATLET

PON merupakan puncak pembinaan secara berjenjang dari daerah hingga nasional. Atlet yang keluar sebagai juara pada ajang PON diharapkan bisa sukses pada ajang yang lebih tinggi di tingkat dunia. PON bukan hanya sekadar adu gengsi antar provinsi, tetapi juga membuka ruang memantau atlet berprestasi di tiap-tiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Atlet yang dinilai memiliki potensi dapat dipersiapkan berlaga pada perhelatan internasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan kesuksesan PON XX Papua, sangat penting bagi terselenggaranya *sport for all* dan proses pembibitan atlet. PON tahun ini merupakan kejuaraan multi even nasional ke-20. Untuk itu, penyelenggaraan PON di Papua ini diharapkan sebagai ikatan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Semangat penyelenggaraan ini juga menunjukkan bahwa setiap provinsi punya hak yang sama dan peluang yang sama,” tuturnya. ● eko,rmm/es

Bukti Pemerataan Pembangunan

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua jadi tumpuan unruk menyatukan anak bangsa lewat olahraga prestasi. Apalagi, PON kali ini diselenggarakan di provinsi paling timur Indonesia yang diharapkan bisa menggugah perhatian masyarakat Papua yang tingkat sensitivitasnya sangat tinggi soal kesejahteraan dan isu keamanan.



SEDIANYA

PON XX dihelat pada 2020 lalu. Namun, kendala infrastruktur venue yang belum rampung 100 persen ditambah

gelombang wabah virus corona, membuat PON ini harus dundur. Komisi X DPR RI memberi perhatian khusus soal PON ini. Akhir September lalu, Komisi X menerjunkan tiga tim sekaligus ke Papua untuk melihat dari dekat

kesiapan venue di beberapa kota, seperti Jayapura, Merauke, dan Mimika.

Parlementaria berhasil mewawancarai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian via Whatsapp, awal Oktober lalu. PON XX ini diharapkan memantik sukses prestasi dan ekonomi sekaligus. Masyarakat Papua yang selama ini mungkin merasa tak mendapat perhatian pemerintah pusat, kini ikut bahagia bersama perhelatan PON XX.

Adalah momentum ideal menyatukan anak bangsa lewat perhelatan PON. Semua etnis, bahasa, dan agama

Nusantara menyatu di Papua. “Tidak kalah penting, penyelenggaraan PON di Papua dapat kita lihat sebagai simbol persatuan dan kesatuan nasional,” tutur Hetifah. Tinggal bagaimana menjaga keamanan di Papua terus kondusif, tidak saja setelah PON berakhir, tapi pasca perhelatan PON, Papua tetap aman dan kondusif.

Pemerintah pusat sangat serius mengamankan PON ini. Sejak beberapa bulan sebelum PON dibuka, personil gabungan TNI dan Polri sudah ditebar ke seluruh wilayah Papua. Pemerintah tentu punya kepentingan



Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat menjau salah satu venue PON XX Papua. Foto: Agung/mvl

dengan keamanan Papua, karena ingin menggalakkan pembangunan secara masif di bumi Papua. Tiga kota penyelenggara PON (Jayapura, Mimika, Merauke) sangat terkendali.

“Saya rasa, pemerintah sangat serius dalam menangani keamanan PON. Sejak beberapa hari lalu, personel gabungan TNI dan Polri sudah berjaga sejak di Bandara Sentani sampai ke arena pertandingan. Aparat keamanan juga tersebar di berbagai sudut kota dan kabupaten yang menjadi tempat penyelenggaraan. Selain itu, lokasi yang akan digunakan untuk pertandingan PON sudah aman. Beberapa kejadian, termasuk kerusakan dan rentetan penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berada dekat dengan venue PON,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Hetifah mengaku sangat yakin dengan keamanan dan kesuksesan penyelenggaraan PON ini. Kelancaran dan ketertiban PON XX jadi keniscayaan. Di sisi lain, PON juga memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua. Dengan PON ini tentu banyak produk kerajinan dan kuliner khas Papua mengemuka di tengah penyelenggaraan PON. Bahkan, pariwisata Papua juga kian dikenal luas. Ekonomi masyarakat Papua pun menggeliat menuju kesejahteraan yang optimal.

“Secara garis besar, ada sukses prestasi dan sukses ekonomi. Selain meningkatnya ekonomi Papua ketika PON berlangsung melalui promosi, pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan lainnya, kami juga berharap PON menjadi momentum para atlet Papua untuk unjuk gigi. Kami yakin banyak bibit-bibit atlet Papua yang mungkin selama ini kurang terlihat karena keterbatasan akses, akan menunjukkan prestasi terbaiknya pada PON Papua,” harap Hetifah.

Saat delegasi Komisi X berkunjung ke Papua untuk melihat venue PON, Hetifah menilai, banyak kemajuan pembangunan infrastruktur di Papua, terutama bila dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Tidak hanya

venue, tapi juga lingkungan sekitar venue sudah tertata sangat baik dan indah. Ini hasil sinergi yang maksimal antara otoritas PON dengan pemerintah. Masyarakat Papuapun mungkin merasakan perbedaan yang menyolok dengan kondisi hari ini, yang nyaman dan aman.

“Dalam kunjungan kami, kami menyadari ada banyak kemajuan dalam pembangunan fisik dibanding kondisi saat kami berkunjung sebelum Covid-19.

protokol kesehatan. Para penonton yang ingin hadir menyaksikan pertandingan harus sudah divaksin dosis kedua.

Dengan memperketat protokol kesehatan, klaster penularan virus corona di arena PON bisa dihindari. Kerja keras penyelenggara patut diacungi jempol. Para atlet yang terpapar Covid-19 langsung diisolasi dan ditangani hingga dinyatakan negatif. Dengan begitu, PON ini selain dibanjiri

KAMI MENYADARI ADA BANYAK KEMAJUAN DALAM PEMBANGUNAN FISIK DIBANDING KONDISI SAAT KAMI BERKUNJUNG SEBELUM COVID-19. BUKAN HANYA VENUE PON-NYA SAJA, NAMUN JUGA LINGKUNGAN SEKITAR VENUE YANG LEBIH TERTATA.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian. Foto: Agung/mvl

Bukan hanya venue PON-nya saja, namun juga lingkungan sekitar venue yang lebih tertata. Dengan sinergi semua pihak, baik PB PON, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat Papua, kami optimis bahwa PON akan terselenggara dengan optimal,” seru legislator Kalimantan Timur itu.

Sementara itu membincang soal pandemi Covid-19 di arena PON, Hetifah mengapresiasi penyelenggara dan pemerintah yang mengencakan vaksinasi ke desa-desa, terutama desa-desa yang berdekatan dengan venue. Penyelenggara pun memperketat

sukses prestasi, juga sukses ekonomi, keamanan, dan kesehatan.

“Saya mengapresiasi langkah preventif penyebaran Covid-19 oleh penyelenggara. Diantaranya mensyaratkan percepatan vaksinasi bagi lima kabupaten/kota yang menjadi venue PON XX dan penonton yang masuk PON harus sudah vaksin 2 kali. Atlet dan tim official pun sudah harus vaksin 2 kali untuk bisa bertanding. Selain itu, pemerintah pusat telah memberikan prioritas distribusi vaksin dan dukungan tambahan tenaga vaksinator TNI-Polri dan relawan untuk akselerasi,” tutup Hetifah. ● mh/es

Protokol Kesehatan Super Maksimal

Sempat tertunda selama setahun, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akhirnya terlaksana meski dunia sedang mengalami pandemi Covid-19. Tentu saja dengan memperketat prinsip perlindungan kesehatan.



WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan seluruh fasilitas dan sarana pendukung

kesehatan telah disiapkan di tempat-tempat wilayah pertandingan akan dilaksanakan. Seperti diketahui, PON XX Papua dilakukan di empat wilayah berbeda, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Di empat wilayah ini disiapkan rumah sakit-rumah sakit rujukan.

“Seluruh fasilitas, sarana dan layanan kesehatan maupun tenaga kesehatan ada dan maksimal di tempat-tempat wilayah pertandingan,” katanya saat mengawasi aspek kesehatan gelaran pesta olahraga nasional di Papua beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi dari Ketua Panitia Pengawasan dan Pengarah PON XX Papua, Di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ada Sembilan rumah sakit, di Kabupaten Merauke ada tiga rumah sakit, dan di Kabupaten Mimika ada tiga rumah sakit. Ini ditambah dukungan 51 ambulans yang disiagakan di sejumlah tempat pertandingan. Lalu ditambah poli-poli kesehatan di setiap tempat

pertandingan. Ini di luar rumah sakit rujukan dan nasional yang disiagakan.

Selain itu, tenaga kesehatan dan pendukung layanan kesehatan juga telah disiapkan. Total ada 54 tim kesehatan, 420 dokter dan perawat, pengemudi 110 orang dan didukung 1.000 relawan. Dari 420 dokter dan perawat akan ditempatkan di sejumlah daerah yaitu di Kota Jayapura

sebanyak 115 orang, Kabupaten Jayapura sebanyak 115 orang, Kabupaten Merauke sebanyak 100 orang serta Kabupaten Mimika sebanyak 90 orang.

Selain itu, panitia juga melakukan pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan atau hasil swab PCR bagi mereka yang datang dari luar Papua. Dan nantinya saat mereka akan meninggalkan Papua juga wajib dilakukan pemeriksaan swab. Dengan demikian diharapkan menekan sekecil mungkin kemungkinan penyebaran Covid-19.

“Jika melihat laporan dari Dinkes Papua, secara umum sudah bagus dari persiapan aspek kesehatan.

Namun, kami (Komisi IX) terus mengingatkan agar setiap gelaran olahraga seperti PON dalam situasi pandemi Covid-19, harus



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Foto: Mentari/invl

“SAYA BERHARAP PON XX PAPUA INI JUGA BISA MEMBERI MANFAAT LAIN BAGI MASYARAKAT PAPUA. SALAH SATUNYA BISA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WARGA SEKITAR”



Anggota Komisi X DPR RI
Desy Ratnasari. Foto: Ridwan/hvl

diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang super ketat,” tuturnya.

Selain menyediakan sarana prasarana bidang kesehatan, menurut Melki sapaan akrab Melkiades Laka Lena, pemerintah juga perlu melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi. “Kami akan terus mendorong agar pemda bisa didukung oleh Kemenkes dan semua yang bisa membantu kesuksesan vaksinasi agar segera mencapai target nasional,” imbaunya.

PROTEKSI KESEHATAN

Berkenaan pandemi Covid-19, akibat antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi belakangan saat mendekati penyelenggaraan PON XX Papua ini dinilai komisi X menjadikan rahmat agar masyarakat Papua lebih siap. Namun, sebagai tindak lanjut dari sukses

vaksinasi itu sebaiknya terus dilakukan edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang langkah langkah preventif menghadapi pandemi yaitu dengan penerapan Protokol kesehatan, seperti sarana cuci tangan, pemakaian masker, dan menjaga jarak

“Sementaraantisipasi kuratif adalah klinik penanganan seperti tempat karantina, tenaga medis, obat dan peralatan penunjang lainnya. Barangkali kita mesti menjadikan penyelenggaraan Olimpiade dan Pra Olympic Tokyo bisa jadi referensi,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih

Untuk itu, segala persiapan dari segi fisik dan non fisik perlu terus digencarkan oleh semua pihak. Kuncinya, semua pihak memang dirasa perlu menyiapkan dukungan agar PON Papua 2021 makin semarak.

Adapun dukungan, animo, semangat, kebanggaan dan rasa nasionalisme dari seluruh elemen masyarakat nyatanya perlu digaungkan agar pesta rakyat termegah di negeri ini bisa sukses terselenggara meski di kala pandemi sekalipun

“Perlunya koordinasi yang menyeluruh antara pihak penyelenggara event pemerintah pusat, daerah, KONI dengan organisasi tiap Cabor, tokoh masyarakat, ormas dan pemuda. Keterlibatan dalam event akan menjadikan mereka merasa memiliki dan ini akan membantu pihak keamanan sebagai organ utama pengamanan situasi dan kondisi. Pendekatan edukatif, persuasif dan humanis dari organ keamanan kita menjadikan Papua sangat kondusif,”katanya.

Upaya sistematis pemerintah Indonesia dibantu seluruh lapisan masyarakat cukup berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, Indonesia berhasil menyelenggarakan kegiatan besar di tengah pandemi tanpa adanya lonjakan kasus. PON XX Papua 2021 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu.

TINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT

Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari berharap PON ke-XX Papua membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Seperti meningkatkan perekonomian masyarakat Papua. “Saya berharap PON XX Papua ini juga bisa memberi manfaat lain bagi masyarakat Papua. Salah satunya bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar,” ujar Desy

Desy menyadari, bangsa Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pandemi Covid-19. Oleh karenanya protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus tetap dijalankan. Ia berharap, PON XX Papua ini juga bisa dinikmati secara langsung maupun melalui media elektronik oleh masyarakat pecinta olahraga. ● rnm/es

Apresiasi Tinggi pada Sektor Keamanan

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua resmi ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meski awalnya banyak pihak menyangsikan, namun berkat kerja sama seluruh *stakeholder* bidang keamanan dan tentu saja disokong oleh masyarakat setempat, PON XX Papua dari awal pembukaan hingga penutupan berlangsung kondusif.



ANGGOTA

Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat mengunjungi Papua menilai, Kodam XVII/ Cenderawasih telah bekerja

secara optimal untuk memastikan PON XX berjalan dengan baik. Dave juga mengapresiasi seluruh personel TNI yang terus berupaya mencegah adanya ancaman atau gangguan keamanan, serta upaya penyusupan dari kelompok separatis di Papua.

Dirinya menilai jajaran Kodam XVII Cenderawasih telah bekerja dengan optimal memastikan keamanan PON tetap tertangani dengan baik dari segala macam gerakan-gerakannya yang coba diinisiasi atau coba disusupi oleh OPM.

"Semuanya telah berhasil ditangkis dan kita patut apresiasi luar biasa kepada seluruh personel TNI telah bekerja secara optimal untuk memastikan tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan ataupun serangan-serangan dari kelompok-kelompok separatis tersebut," ujarnya.

Wakil rakyat dapil Jabar VIII ini juga mengapresiasi BIN Daerah Papua yang telah berkoordinasi dengan seluruh instansi dalam menjaga kondusifitas Papua dan menangkal segala bentuk

kegiatan yang bertujuan untuk menggagalkan penyelenggaraan PON XX Papua.

Dave berharap kondusivitas Papua saat ini juga dapat berlangsung terus ke depannya dalam mendukung kebijakan pembangunan sumber daya alam, manusia hingga infrastruktur dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Dari BIN Papua juga telah berkoordinasi dengan baik dengan seluruh instansi untuk menangkal segala macam kegiatan-kegiatan yang dapat menggagalkan atau mengacaukan rencana

ataupun pelaksanaan PON ini," tutur Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Hal yang sama juga diucapkan Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Ia mengapresiasi TNI dan Polri yang telah melakukan pengamanan selama pekan olahraga itu berlangsung.

"Kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polri dan TNI atas pengamanan PON di Papua sehingga berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti," kata Supriansa.

PON adalah pesta olahraga tingkat nasional yang membanggakan. Dia menilai kinerja TNI dan Polri memuaskan dalam pengamanan PON Papua ini. "Ini pesta olahraga yang membanggakan. Persatuan dan kesatuan melalui even olahraga PON sangat memuaskan. PON-nya lancar dan Polri dan TNI

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.
Foto: Natasya/mv





**“TIDAK ADANYA
INSIDEN-INSIDEN YANG
MENDAPAT SOROTAN
MEDIA MENUNJUKKAN
KOLABORASI YANG BAIK
DENGAN BERBAGAI ELEMEN
MASYARAKAT PAPUA,”**

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rvf

kinerjanya sangat memuaskan," kata dia.

Pelaksanaan PON di Papua, akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk warga Papua. Dia juga mengapresiasi kinerja pemerintah. "Menurut saya ditempatkannya pelaksanaan PON di Papua tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua. Atensi pemerintah sangat luar biasa," jelasnya

**KERJA PENGAMANAN DINILAI
TERUKUR**

Sementara itu, Komisi III DPR RI Arsul Sani juga memberikan apresiasi kepada TNI Polri. Dia mengatakan PON Papua berjalan lancar berkat kerja sama seluruh elemen. "Sukses dan lancarnya PON Papua harus diakui tidak terlepas dari kerja-kerja pengamanan yang terukur dari Polri dan TNI. Komisi III DPR RI mengapresiasi seluruh jajaran Polri, TNI dan unsur intelijen serta Pemda Provinsi Papua yang terlibat dalam proses pengamanan tersebut," kata Arsul Sani.

Pengamanan yang dilakukan di PON Papua tidak hanya mengedepankan pagelaran pasukan. Akan tetapi juga menjalin komunikasi dengan warga Papua.

"Komisi III mencatat bahwa konsep pengamanan yang dilakukan bukan dengan hanya mengedepankan

pagelaran pasukan saja namun juga dengan membangun pendekatan serta komunikasi yang baik dengan unsur-unsur masyarakat Papua sehingga potensi gangguan keamanan lebih terminimalisir dan terkelola dengan lebih baik," sebutnya.

"Tidak adanya insiden-insiden yang mendapat sorotan media menunjukkan kolaborasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat Papua," lanjutnya.

WAPRES BERI CATATAN PENTING

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menutup perhelatan PON XX Papua mengaku bangga dan terharu atas

tekad dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Papua yang bahu membahu mempersiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini.

Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON XX ini tidak mudah untuk dilakukan.

"Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif, dengan standar dan kualitas internasional," ujar Ma'ruf.

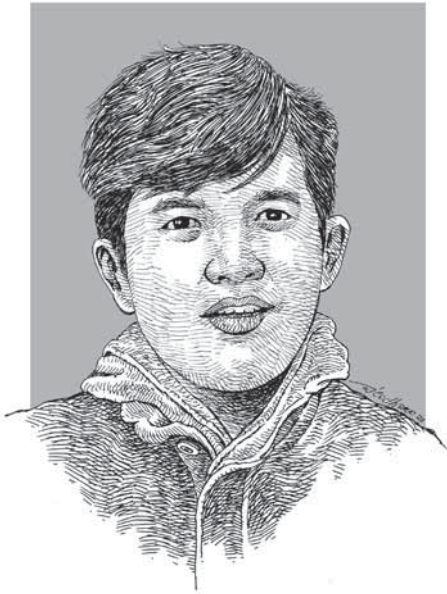
Yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue sangat tersebar dari Jayapura, Mimika dan Merauke. Jarak antar satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini. Dan ketiga, PON XX ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi Covid-19, yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

"Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Ini sesuai dengan semboyan Torang Bisa! Torang bisa bukan hanya semboyan tetapi nyata dan terbukti," tukasnya. ● rnm/es



**“KAMI MEMBERI APRESIASI YANG
SETINGGI-TINGGINYA KEPADA
JAJARAN POLRI DAN TNI ATAS
PENGAMANAN PON DI PAPUA
SEHINGGA BERJALAN LANCAR
TANPA ADA KENDALA
YANG BERARTI,”**

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Foto: Jaka/rvf



Oleh; Fajar Abdillah
Wartawan olahraga di Mola TV

Sepanjang sejarah, Papua menjadi wilayah keenam di luar Pulau Jawa yang menggelar PON. Setelah Medan pada 1953 dan Makassar pada 1957, penyelenggaraan PON di luar Jawa kembali diadakan pada 2004 di Palembang, Sumatera Selatan. Disusul dua penyelenggaraan berikutnya di Samarinda (2008) dan Pekanbaru (2012).

Apresiasi tentu patut disematkan terhadap komitmen Papua dalam membuktikan diri bahwa mereka lebih dari siap untuk menjadi tuan rumah. Salah satunya adalah megahnya Stadion Lukas Enembe yang kini bisa menjadi simbol semangat olahraga dari provinsi paling timur di Indonesia tersebut.

Berbicara stadion sepak bola di Papua, sebelumnya mungkin hanka Stadion Mandala yang familiar di telinga. Berbicara soal tantangan, tentu bukan perkara enteng menyiapkan segala sesuatunya di tengah kondisi pandemi yang melanda dunia hampir dua tahun belakangan. Terlebih, sarana dan prasarana yang disiapkan tidak sekadar asal jadi,



PON XX 2021 Momentum Pembuktian Papua

Papua berhasil menjawab tantangan dengan menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20. Diresmikan secara meriah pada Sabtu, 2 Oktober 2021, penyelenggaraan PON ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat atau siapa pun pemangku kepentingan di sana, untuk membuktikan bahwa mereka siap menjawab tantangan. Mereka siap mengemban tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh wilayah-wilayah lain di tanah air, khususnya di Pulau Jawa.

tetapi memang sesuai dengan standar dunia.

Contohnya ada stadion akuatik yang mendapat sertifikasi dari induk organisasi renang dunia FINA (Federation Internationale de Natation) pada 27 Juli 2021. Kemudian ada arena hoki luar ruangan (hockey outdoor)

juga sudah mendapatkan sertifikasi Fédération Internationale de Hockey (FIH), FIFA-nya hoki dunia.

Belum berhenti di situ, Istora Papua Bangkit juga menyabet rekor di Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk tiga kategori sekaligus seperti struktur baja lengkung bentang terpanjang, atap

tanpa sambungan/ dome terluas, hingga instalasi terpanjang dan diameter terbesar.

Pembangunan sarana dan beragam fasilitas ini tentu memiliki efek jangka panjang dan keberlanjutan bahkan setelah PON Papua berakhir. Masyarakat bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk beragam hajat olahraga yang tentu akan menstimulasi geliat olahraga di Papua.

Dari aspek olahraga, ini juga menjadi pembuktian bagi para atlet

berdarah Papua untuk bisa berbicara lebih banyak. Bahwa selain sepak bola, ada cabor-cabor lain yang mereka juga bisa bersaing dengan atlet-atlet dari provinsi lain. Hal tersebut bisa diukur dari per diresmikannya PON XX Papua, tuan rumah menempati peringkat kedua di bawah DKI Jakarta.

Hingga penyelenggaraan berakhir, Papua berhasil mengamankan peringkat keempat dalam ajang PON kali ini. Hanya Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang mampu meraih medali emas lebih banyak daripada sang tuan rumah. Hal ini cukup untuk menjadi bukti bahwa Papua punya potensi yang sama dengan daerah lain, tinggal bagaimana menjaga momentum tersebut.

Tidak ada momentum yang lebih tepat dibandingkan penyelenggaraan PON XX bagi warga Papua untuk mulai fokus ke cabang olahraga lain. Sudah saatnya Papua melahirkan bakat-bakat baru selepas era Lisa Rumbewas yang praktis tidak punya penerus pengharum nama baik daerah selepas dia pensiun.

Sejauh ini, memang belum ada atlet Papua yang melewati prestasi Lisa di kancah dunia. Sumbangan dua perak dan satu perunggu dari tiga Olimpiade

SEBAGAI TUAN RUMAH, PAPUA TENTU INGIN DIKENANG SEBAGAI SALAH SATU PENYELENGGARA TERBAIK

menjadi bukti dirinya layak menjadi panutan anak-anak Papua lain. Bahkan seorang Boaz Solossa pun, masih jauh dari kata cukup untuk membuktikan prestasi di cabang olahraga yang ia geluti jika berbicara level dunia. Ingat, level dunia, seperti Lisa Rumbewas.

Memang ada nama-nama lain seperti Frank Burumi yang berhasil menyumbang tiga emas di SEA Games 2011. Lalu ada aNesthy Stella Iriani Pedai yang meraih emas di cabang olahraga panjat tebing. Dengan usia yang masih terbilang muda, 19 tahun, tentu masih banyak waktu untuk menempanya menjadi olahragawan tingkat dunia.

Dengan berbagai keberhasilan pembangunan penunjang di atas, potensi Papua untuk bisa bersaing di cabang olahraga lain tentu besar. Sehingga di masa mendatang, lahir atlet-atlet penerus yang akan mengharumkan nama Papua itu sendiri, bahkan nama Indonesia di kancah internasional.

Di samping berbagai aspek kesuksesan yang diraih, tentu masih banyak pembenahan yang perlu dijadikan bahan evaluasi di masa mendatang. Tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk pihak yang nantinya akan terlibat dalam penyelenggaraan PON di masa mendatang.

Beberapa insiden dalam pertandingan jelas menjadi catatan penting jika tidak ingin merusak nilai sportivitas yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan PON. Salah satu yang

paling mencuri perhatian adalah insiden manipulasi hasil pertandingan di cabang sepak bola antara Aceh melawan Kaltim.

Dua tim tersebut diduga “bermain mata” demi mengamankan nasib masing-masing lolos ke babak berikutnya. Di sisi lain, Sulawesi Utara yang hanya butuh kedua tim tersebutimbang untuk lolos, harus pulang lebih awal. Jika sudah demikian, tentu menimbulkan kerugian pada sejumlah pihak.

Selain itu, kabar mengenai tidak dibayarkannya honor para relawan yang terlibat sepanjang penyelenggaraan PON juga harus menjadi perhatian khusus. Tidak elok rasanya jika kesuksesan penyelenggaraan kali ini hanya terlihat pada sisi luar namun borok di dalam. Jika dibiarkan, tentu akan menjadi api dalam sekam yang perlahan menggerogoti bagian luar.

Sebagai tuan rumah, Papua tentu ingin dikenang sebagai salah satu penyelenggara terbaik. Oleh karena itu, kesan yang ditinggalkan dan didapatkan para peserta dari luar daerah juga harus baik. Hal ini menyangkut nama baik Papua di mata nasional. Beragam kesuksesan yang telah diraih di dalam arena, tidak boleh rusak karena segelintir kendala yang terjadi di luar.

Pekerjaan rumah lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana tetap menjaga sarana dan prasarana sepanjang penyelenggaraan PON XX tetap berfungsi dengan baik. Tentu kita tidak ingin Stadion Lukas Enembe bernasib sama seperti Stadion Palaran, Stadion Utama Riau, hingga Stadion GBLA yang terbelengkalai selepas penyelenggaraan PON.

Kembali lagi ke soal momentum. Momentum olahraga yang terjaga dengan baik dapat membuat nasib beragam fasilitas yang dibangun dengan dana miliaran, setidaknya bisa terjaga dengan baik dengan terpakai secara rutin. Secara tidak langsung, hal tersebut juga memberi sumbangsih kepada masyarakat Papua untuk membangun kecakapan olahraga untuk bersaing dengan provinsi-provinsi lain.

Ayo Papua! Torang Bisa •



Perubahan Skema BPJS Kesehatan Perlu Kajian Komprehensif

Perubahan skema BPJS Kesehatan yang berdampak pada penghapusan yang ada menjadi kelas standar semula akan diterapkan pada tahun 2021. Rencana tersebut kemudian mundur dan direncanakan akan mulai diujicobakan pada tahun 2022 mendatang.



PERUBAHAN skema tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Pasal 23 ayat 4 yang berbunyi dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di RS, maka kelas pelayanan di RS diberikan berdasarkan kelas standar.

Teknisnya telah diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 yang merupakan

Perubahan Kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 54 B, penerapan kelas standar dilakukan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022. Penerapan kelas standar akan dibagi menjadi dua kelas, yakni Kelas A untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Kelas B diperuntukkan untuk peserta Non-PBI JKN.

Perubahan dilakukan secara bertahap dimulai dari kelas 1,2,3 yang saat ini berlaku, akan menjadi 2 kelas standar terlebih dahulu. Selanjutnya akan terus dievaluasi hingga pada kondisi yang sudah ideal, yaitu menjadi PBI JKN dan Non-PBI JKN. Dari segi permintaan. Berbicara penghapusan kelas peserta BPJS, berarti terkait pula belanja kesehatan. Jika peserta BPJS kelas 2 dihilangkan, maka akan berdampak terhadap daya beli dan kemauan belanja masyarakat di sektor kesehatan. Perubahan kelas kemungkinan akan berdampak pada iuran.

Merespon rencana ini, sejumlah pihak telah menyampaikan sejumlah catatan. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai, yang perlu diperhatikan BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan skema tersebut. Poin pertama yakni, bahwa kebijakan ini nantinya harus mempertimbangkan, memperhatikan kemampuan para peserta yang bukan yang Non-PBI, yakni peserta kelas B. Menurutnya, pada kelas ini, peserta yang sebelumnya pada kelas 3.

Menurut Mufida, -ini merupakan persoalan penting dan apabila salah persepsi bisa berbahaya bagi masyarakat. Sehingga ia menilai perlu adanya kajian dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kajian tersebut harus mencakup beberapa hal, yaitu pertimbangan kemampuan membayar dari para peserta yang mandiri atau PBPU, khususnya yang kelas 3.

Dalam penjelasan Mufida, saat ini, pada kepesertaan BPJS kelas 3 PBPU mandiri, besaran iuran yang dibebankan awalnya sebesar Rp42 ribu. Kemudian pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 ribu, sehingga besar iuran yang dibebankan sebesar Rp35 ribu per

bulan. Adapun nominal tersebut adalah besaran yang mengalami kenaikan dari iuran sebelumnya sejumlah Rp25 ribu.

Mufida berharap penghapusan kelas nantinya tidak memberikan kenaikan pada masyarakat kelas 3 mandiri. “Itu nomor satu hal-hal yang harus diperhatikan, jadi harus ada asas keadilan dalam hal penentuan tarif yang memperhatikan *ability to pay* dari masyarakat ataupun peserta kelas 3 mandiri,” ucap Mufida ketika dihubungi tim **Parlementaria**, baru-baru ini.

Lanjut Mufida, poin kedua yakni perlu ada data yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk pembagian kelas A dan kelas B. data tersebut memuat siapa saja yang nanti akan masuk kelas A dan kelas B. Menurutnya, permasalahan data selama ini tidak kunjung selesai sehingga data yang akan menjadi patokan ini harus benar-benar sudah berdasarkan cleansing data yang transparan, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Nah itu pertimbangan kedua yang harus diselesaikan oleh semua pihak terkait dengan pengambilan keputusan, pemberlakuan kebijakan ini, jadi terkait dengan pembagian peserta nanti harus berbasis pada data cleansing data yang menjadi PR lama dan cleansing data yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuah politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya memperhitungkan dari pihak rumah sakit (RS) sebagai pertimbangan ketika akan menerapkan kebijakan BPJS tersebut. Mufida menekankan, hal ini perlu menjadi bahan kajian juga sehingga beban pada Rumah sakit tidak semakin bertambah sebagai dampak dari perubahan skema BPJS ini dan nantinya RS tetap bisa memberikan pelayanan yang baik untuk peserta BPJS kelas A dan B.

“Dan juga untuk pihak RS yang juga menjadi pihak yang mendapatkan dampak dari adanya perlakuan satu kelas standar ini, karena kan RS harus merubah komposisinya menjadi kelas A. Itu berarti akan disediakan perawatan

HARUS ADA ASAS KEADILAN DALAM HAL PENENTUAN TARIF YANG MEMPERHATIKAN *ABILITY TO PAY* DARI MASYARAKAT ATAUPUN PESERTA KELAS 3 MANDIRI

Anggota Komisi IX DPR RI
Kurniasih Mufidayati. Foto: Jaka/rvi



dengan kamar standarnya seperti apa, lalu kelas B akan diberikan standar pelayanan seperti apa, kan seperti itu harus ada perubahan yang tadinya kelas 1, 2 dan 3 sekarang hanya menjadi dua kelas,” urai politisi dapil DKI Jakarta II tersebut.

Dan terakhir, Mufida mengingatkan bahwa skema penghapusan kelas tersebut harus benar-benar dikaji mengenai finalisasi tarifnya harus benar-benar adil untuk semua kalangan. Kajian tersebut harus yang kompeherensif dengan memperhatikan semua kepentingan, berkeadilan untuk semua calon peserta baik yang kelas A maupun kelas B, memperhatikan daya finansialnya maupun daya belinya sehingga jadi tidak ada yang dibebankan lebih berat lagi.

Mufida pun mengungkapkan perkembangan BPJS tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait, usai masa reses berakhir. “Nanti kita lihat lagi, ini kan masih reses. Jadi nanti begitu masuk setelah 1 November itu mulai masa sidang lagi ya, kita akan diskusikan lagi dengan mengundang RDP lagi dari BPJS Kesehatan, Kemenkes, DJSN dan semua pihak yang terkait,” tutup Mufida.

Di sisi lain, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) belum bicara mengenai

dampak penghapusan kelas terhadap kewajiban iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan. Menurut Anggota DJSN Muttaqien, komposisi iuran hingga saat ini masih proses pengkajian. Iuran akan dibagi antara kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mendengar besaran iuran peserta BPJS rencananya akan berada antara Rp50.000 dan Rp75.000. Bagi peserta BPJS kelas 3 yang saat ini jumlahnya sekitar 20 juta orang, menurutnya tentu akan memberatkan. Dia berpesan agar besaran iuran tidak memberatkan. Selain itu, Pakar kesehatan Hermawan Saputra melihat dibutuhkan setidaknya 10 tahun. Mulai dari pengkajian hingga implementasi perubahan skema kepesertaan BPJS yang berdampak penghapusan kelas.

Mengacu JKN, keuntungan dari penghapusan kelas dilihat dari dua yaitu manfaat medis dan non medis. Manfaat medis menjadi tanggung jawab Kemenkes yang sampai sekarang masih berproses diskusi. Termasuk implikasi pada perubahan daftar jenis penyakit yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Sedangkan manfaat non medis berupa kelas rawat inap JKN yang menjadi tugas DJSN untuk mempersiapkannya.

● hal/sf

Postur APBN 2022: Harus Mampu Jawab Tantangan Pemulihan Ekonomi

DPR RI mengharapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kredibel, sehat dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan tahun depan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Parlemen bersama pemerintah telah semaksimal mungkin melihat berbagai kemungkinan tantangan pada tahun depan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan apresiasinya serta mendorong kepada pemerintah agar tetap konsisten dalam mengupayakan target-target dalam APBN 2022. Kemampuan pemerintah dalam

mengendalikan pandemi Covid-19 menjadi kunci agar proyeksi APBN 2022 dapat terwujud.

“Untuk itu kami mengapresiasi kerja pemerintah yang mampu melakukan flattening the curve pada Covid-19 dan berharap pengendalian pandemi bisa terus konsisten,” ujar Said. Dampak pengendalian pandemi selama ini terlihat dengan

mulai pulihnya perekonomian nasional dengan ditunjukkan oleh kinerja neraca perdagangan yang terus mencatatkan hasil positif hingga pertengahan tahun 2021. Meski demikian kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2021 menurun yang disebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan.

“Namun kami memperkirakan NPI di kuartal III dan IV tahun ini akan kembali membaik,” sebut Said. Dalam outlook APBN 2022 nanti DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Menurut Said, Indonesia dapat optimistis dengan target itu sebab sudah memiliki modal yang baik pada triwulan kedua tahun ini, dimana pertumbuhan ekonomi nasional berhasil tumbuh 7,2 persen secara tahunan yang berarti telah melewati masa resesi.

“Walaupun di kuartal ketiga tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali koreksi, namun pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2021 diperkirakan mampu tumbuh kisaran 3,7-4,5 persen. Hal itu merupakan modal untuk mencapai target pertumbuhan di tahun 2022 nanti,” urai politisi PDI-Perjuangan itu.

Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nantinya diharapkan akan memberikan dampak terhadap tingkat inflasi. Untuk itu tingkat inflasi pada tahun 2022 nanti diperkirakan berkisar pada level 3 persen. Hal itu kata Said sejalan dengan



Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/mvi

komposisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada masa normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

PENDAPATAN DARI PAJAK

Dari sisi pendapatan dalam postur APBN 2022, DPR RI bersama pemerintah menyepakatinya negara sebesar Rp1.846,1 triliun. Pendapatan negara itu naik 6,3 persen dari asumsi pendapatan negara tahun ini yang tergambar pada APBN 2021 sebesar Rp1.735,7 triliun. Pendapatan yang naik

perubahan juga pada target PNBPN dari semula usulan pemerintah Rp333,16 triliun menjadi Rp335,56 triliun atau meningkat Rp2,39 triliun.

Dari sisi pajak, Said berharap kebijakan reformasi perpajakan yang meliputi aspek administratif maupun aspek kebijakan akan mampu menghilangkan barrier penerimaan pajak selama ini. Untuk mewujudkan reformasi perpajakan itu, maka dilakukanlah revisi terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

rencana program pengungkapan sukarela pajak, dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajak yang belum dilaporkan.

BELANJA SEDIAKAN RUANG FISKAL

Pada sisi belanja, UU APBN 2022 menetapkan belanja negara tahun depan sebesar Rp2.714,16 triliun. Jumlah tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan pemerintah sebanyak Rp2.708,68 triliun. Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk belanja pemerintah pusat dialokasikan senilai Rp1.944,54 triliun dimana sebanyak Rp945,75 triliun untuk anggaran belanja Kementerian dan Lembaga pemerintah. Nilai belanja lembaga-lembaga itu mengalami kenaikan Rp5,18 triliun dari usulan awal pemerintah yang sebelumnya sebesar Rp940,57 triliun.

Bicara soal anggaran pemerintah itu, Dolfie mengatakan pihaknya mendorong pemerintah dapat menyediakan ruang fiskal sendiri. "Agar tidak terus menerus refocusing. Untuk antisipasi itu maka dibuat dua kluster (anggaran) di Kementerian dan Lembaga pemerintah. Satu kluster yang harus dialokasikan prioritas dan satu lagi yang apabila akan refocusing sudah ditentukan dari sekarang," urai politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu pada belanja selain Kementerian dan Lembaga dianggarkan sebanyak Rp998,79 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp997,69 triliun atau naik Rp1,1 triliun yang mana digunakan untuk tambahan belanja pendidikan. Belanja non-K/L itu beberapa terdiri dari Rp405,87 triliun untuk Program Pengelolaan Utang Negara juga sebanyak Rp206,96 triliun untuk pengelolaan subsidi energi dan non energi.

Pembiayaan dari utang tampaknya masih menjadi pilar penting bagi struktur APBN 2022. Agar dapat menutupi defisit APBN tahun

"WALAUPUN DI KUARTAL KETIGA TAHUN INI DIPERKIRAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN KEMBALI KOREKSI, NAMUN PERTUMBUHAN EKONOMI HINGGA AKHIR 2021 DIPERKIRAKAN MAMPU TUMBUH KISARAN 3,7-4,5 PERSEN. HAL ITU MERUPAKAN MODAL UNTUK MENCAPAI TARGET PERTUMBUHAN DI TAHUN 2022 NANTI,"

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/nvi



itu akan bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.510,0 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,6 triliun.

Said mengatakan peningkatan target pendapatan negara itu dipatok seiring perubahan kenaikan terjadi pada penerimaan perpajakan dari usulan pemerintah Rp 1.506,9 triliun menjadi Rp 1.510 triliun atau meningkat sebesar Rp3,08 triliun. Selain itu

menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah diketok palu di Rapat Paripurna DPR RI.

Itulah sebabnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan tujuan dari UU itu untuk memperluas basis pajak. Sehingga dalam jangka menengah panjang tax ratio negara akan meningkat. Dolfie juga mengungkapkan bahwa pada regulasi baru itu terdapat pengaturan

“AGAR TIDAK TERUS MENERUS REFOCUSING, MAKA DIBUAT DUA KLUSTER (ANGGARAN) DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH. SATU KLASTER YANG HARUS DIALOKASIKAN PRIORITAS DAN SATU LAGI YANG APABILA AKAN REFOCUSING SUDAH DITENTUKAN DARI SEKARANG,”

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
Dolfie. Foto: Jaka/mvl



depan, DPR RI bersama pemerintah mengusulkan kebutuhan biaya dipenuhi oleh utang sebanyak Rp973,58 triliun. Di samping itu, ada pembiayaan investasi sebesar Rp182,32 triliun dan pemberian pinjaman Rp585,5 miliar.

Atas komposisi pendapatan dan belanja yang ada, maka defisit APBN tahun depan diharapkan mencapai Rp868,02 triliun atau sebanyak 4,85 persen dari total PDB. Menurut Dolfie yang juga Anggota Banggar DPR RI, secara perlahan namun pasti defisit harus kembali ke level 3 persen di tahun 2023 sesuai kewajiban yang tertuang dalam UU. “Cuma memang perlu lihat situasi hingga akhir 2022 nanti, apakah penyusunan (APBN) tahun 2023 bisa kembali ke 3 persen,” ujarnya.

ANGGARAN TANGANI PANDEMI

Masih dari sisi belanja negara, dalam APBN tahun 2022 nanti anggaran kesehatan dipatok sebesar Rp256,01 triliun atau 9,4 persen dari total asumsi belanja negara tahun itu. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam berharap porsi belanja anggaran untuk sektor kesehatan tetap diperkuat. Seiring janji

pemerintah yang sebelumnya telah mengatakan untuk berupaya membuat belanja anggaran di tahun depan menjadi semakin baik.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, belanja di sektor kesehatan tetap harus diutamakan di tengah rencana belanja negara yang besar mulai dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga Penanaman Modal Negara (PMN) hingga triliunan. “Di tengah sulitnya mendapatkan penerimaan (pendapatan), utang mengalami kenaikan hampir seribu triliun,” kata Ecky. Untuk itu ia mengingatkan agar APBN 2022 tetap dapat memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat luas.

“Anggaran juga harus fokus terkait masalah Covid-19. Memang sekarang kasusnya turun. Tapi perlu diingat masih ada jutaan orang yang belum di vaksin dan masih banyak masyarakat yang belum taat protokol kesehatan,” urai Ecky. Adapun vaksin yang diberikan seperti Sinovac juga efikasitasnya terbilang rendah, maka dari itu Ecky bilang program vaksinasi selanjutnya sebaiknya dapat ditopang dari APBN. Dengan demikian belanja

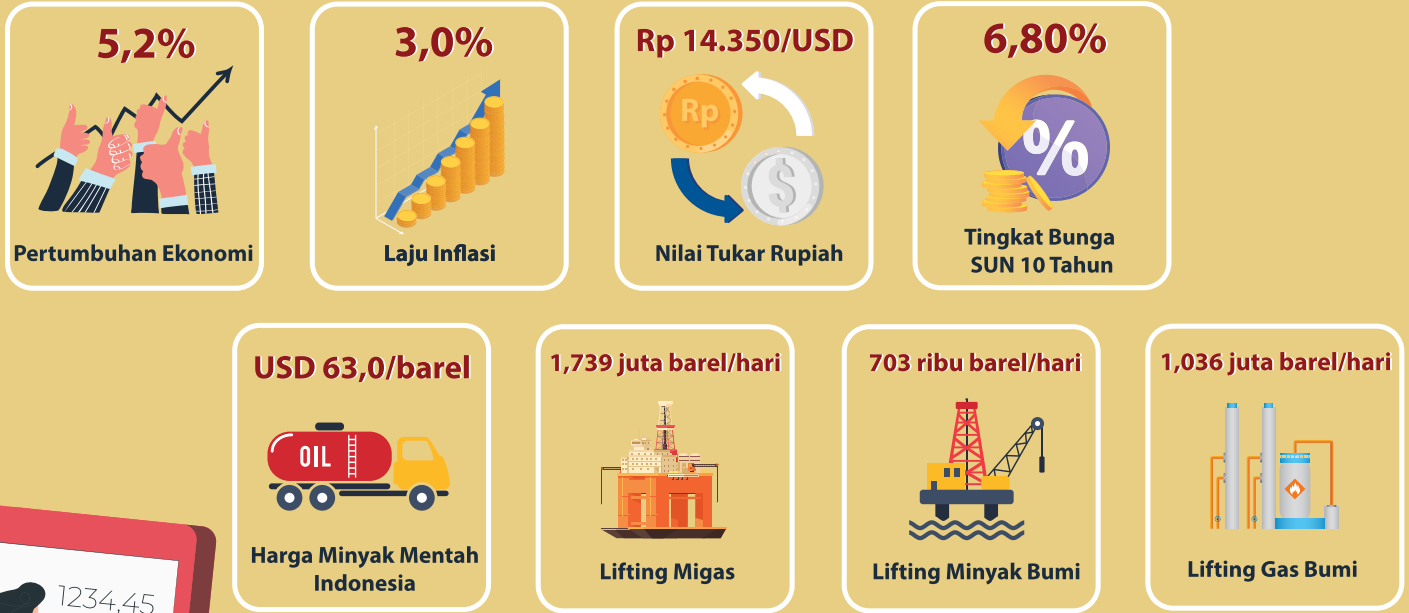
DALAM SITUASI SEPERTI INI, APBN KEMBALI BEKERJA KERAS UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM BIDANG KESEHATAN SERTA KEMBALI MENAMBAH DAN MEMPERPANJANG PERLINDUNGAN SOSIAL SAAT PPKM DAN BERBAGAI STIMULUS EKONOMI.



Anggota Komisi XI DPR RI
Ecky Awal Mucharam.
Foto: Ariel/mvl

APBN 2022

Seiring tren pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat, DPR RI bersama pemerintah sepakat menetapkan APBN 2022. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada tahun 2022:



Dengan asumsi tersebut, maka APBN 2022 menargetkan:

Pendapatan Negara : Rp 1.846,14 triliun

Belanja Negara : Rp 2.714,16 triliun



Sumber : UU APBN 2022

Infografis : Andi Nurul N.R.

APBN bakal memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat.

Saat membacakan pandangan pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Ia menjelaskan bahwa berbagai program penanganan pandemi

Covid-19 dan pemulihan perekonomian masih akan berlanjut agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai.

“Dalam situasi seperti ini, APBN kembali bekerja keras untuk memberikan dukungan dalam bidang kesehatan serta kembali menambah

dan memperpanjang perlindungan sosial saat PPKM dan berbagai stimulus ekonomi. Dengan berbagai langkah yang cepat dan responsif, semua berharap bahwa pandemi dapat terus terkendali sehingga tren pemulihan ekonomi akan terus semakin menguat,” tukas Menkeu. • ah/sf

RUU Landasan Kontinen Harus Perkuat Kedaulatan Bangsa

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landasan Kontinen yang kini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 demi menjaga kedaulatan bangsa dan kemaslahatan negara. Memiliki lebih dari 16 ribu pulau sekaligus garis pantai sepanjang 95.181 km yang terhubung dengan lautan, Indonesia perlu segera membuat kebijakan baru atas lautan di kawasan negara.

Awalnya, untuk melegitimasi penegakan kedaulatan negara atas lautan yang berada di kawasan negara, Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen. Namun seiring dengan perubahan dinamika kebijakan, Pemerintah Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)* Tahun 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Momen itu menandakan UU Nomor 1 Tahun 1973 dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan Indonesia terkini.

Selama ini, jika mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1973, landasan kontinen Indonesia hanya mampu mengatur di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang sepanjang 200 mil laut. Akan tetapi, pada pasal 76 UNCLOS disebutkan bahwa negara pantai dapat mengajukan perluasan landas kontinen di luar 200 mil. Akibat Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, tentu pasal tersebut

membuka peluang dengan potensi sangat besar untuk Indonesia.

Potensi itu berupa perluasan wilayah di luar 200 mil laut secara legal sesuai dengan aturan UNCLOS. Rencananya, RUU Landasan Kontinen ini tidak hanya memayungi aspek kemaritiman saja, namun juga turut meliputi aspek batas negara, penegakan hukum, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, ekonomi,

teknologi infrastruktur, pengembangan ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan negara, serta sosial masyarakat.

DPR RI, melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU Landasan Kontinen ingin agar RUU Landasan Kontinen Indonesia menjadi undang-undang yang tegas namun tidak pincang untuk kedaulatan Indonesia. Sehingga, pada Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, menyetujui memperpanjang masa pembahasan RUU Landasan Kontinen Indonesia.

Sampai saat ini, Pansus RUU Landasan Kontinen bersama pemerintah sedang menyerap aspirasi sekaligus masukan dari berbagai stakeholder.

Tahapan ini menjadi vital sebagai pertimbangan perumusan RUU.

Tidak ingin setengah hati, RUU tersebut berusaha melibatkan



Wakil Ketua Pansus RUU Landasan Kontinen
T.B Hasanuddin. Foto: Jaka/Invi

berbagai pihak agar kebijakan tersebut komprehensif dan efektif dalam penerapannya.

Wakil Ketua Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI T.B Hasanuddin, saat ini DPR RI sedang berupaya melaksanakan pembicaraan tingkat I yang mengundang berbagai pihak, mulai dari jajaran pakar, kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta perusahaan negara. Walaupun draft RUU sudah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengusul RUU, akan tetapi mendengarkan masukan dan aspirasi tetap perlu dilaksanakan guna mewujudkan kesempurnaan yang lebih baik sekaligus komprehensif.

“Banyak hal yang kita diskusikan, ketika wilayah berdaulat itu semakin bertambah sebagai akibat makin luasnya wilayah landas kontinen, maka tentu banyak hal-hal yang perlu digali untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami (Pansus RUU Landasan Kontinen) meminta masukan untuk kesempurnaan dari pembentukan RUU Landas Kontinen itu sehingga jadi lebih baik dan juga komprehensif,” jelas Hasanuddin.

Melalui rapat-rapat yang sudah dilakukan dengan stakeholder, ia menekankan kembali bahwa tujuan RUU Landasan Kontinen ini untuk memperkuat kedaulatan Indonesia yang berlandaskan pada dasar hukum UNCLOS. Jika RUU tersebut nantinya disahkan menjadi UU, maka diharapkan tidak menimbulkan konflik sekaligus melanggar hukum yang telah ditetapkan bersama.

PEMBAHASAN JANGAN PARSIAL

Anggota Pansus RUU Landasan Kontinen Riezky Aprilia menegaskan penyusunan RUU tersebut tidak boleh mengabaikan aspek sosial masyarakat sekaligus aspek perlindungan ekosistem baik di sekitar maupun di dalam laut Indonesia. Menurutnya, jika diabaikan, kemungkinan besar akan menimbulkan potensi konflik.

“PENTING JUGA KAMI BERPESAN BAHWA JANGAN SAMPAI UU LANDAS KONTINEN INI JADI PARSIAL, PARSIAL TERHADAP REGULASI. KITA MAU MENGUATKAN UU LANDAS KONTINEN INI NAMUN *IMPACT-NYA* BENAR-BENAR UNTUK INDONESIA, ITU MAKANYA KITA BILANG JANGAN PARSIAL,”

Anggota Pansus RUU Landasan Kontinen
Riezky Aprilia. Foto: Jaka/nvl



“Penting juga kami berpesan bahwa jangan sampai UU landas kontinen ini jadi parsial, parsial terhadap regulasi. Kita mau menguatkan UU Landas Kontinen ini namun *impact*-nya benar-benar untuk Indonesia, itu makanya kita bilang jangan parsial,” tegas Kiki, sapaan akrabnya.

Dirinya pun memahami, selain menguatkan kedaulatan bangsa, RUU tersebut dibuat dengan turut mempertimbangan aspek perekonomian bangsa. Selama perumusan RUU tersebut, Kiki tidak ingin berat sebelah. Artinya, jika ingin menggali potensi sumber daya alam, maka harus juga mempertimbangkan perlindungan yang berkelanjutan untuk alam dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut.

“Jangan sampai kita memperkuat landas kontinen, (namun) nelayan kita juga banyak yang *ditangkepin*, kan itu kan (masalah) sosial. Lalu, *inget loh* ini ada natural *resources*. Apabila kita tidak jaga baik-baik, itu bisa habis suatu saat nanti. Inilah kenapa ekosistem jangan kita rusak, maka *blue economy* itu (perlu) dibicarakan untuk masa depan,” ujar Anggota Fraksi Partai PDI Perjuangan DPR itu.

Lebih lanjut, proses penyusunan RUU ini akan menghadapi dengan tantangan yang besar karena akan melibatkan banyak pihak untuk membicarakan isu-isu sensitif. Oleh karena itu, menurutnya, baik Pemerintah Indonesia dan DPR RI harus bergotong royong mulai dari proses perumusan hingga pengesahan RUU Landasan Kontinen.

“Kita (Pansus RUU Landasan Kontinen) bersama Pemerintah juga harus *concern* sama hal ini. Kita kan harus berdaulat baik di darat, laut maupun udara. Jadi hal-hal ini memang membutuhkan masa yang agak panjang karena ini bicara *long term*-nya Indonesia ke depan,” terang Kiki.

Sebagai negara kepulauan yang strategis serta berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, Indonesia menjadi bagian dari simpul besar dalam berbagai sektor vital di mancanegara. Oleh karena itu, segenap Bangsa Indonesia harus berkomitmen penuh melindungi dan merawat tidak hanya setiap jengkal daratan dan angkasa namun juga lautan berikut potensi sumber daya yang terkandung dari berbagai hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. ● ts/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Upacara penyematan Wing Kehormatan Penerbang Kelas I dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (5/20/2021). Foto: Eno/Man



Suasana pengambilan sumpah jabatan petakpan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI Korpolkam dari Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Foto: Tim/Man





Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur dan Kepala BNNP Jawa Timur beserta jajarannya di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin (11/10/2021). Foto: Hanum/nvi



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau gudang vaksin Covid-19 didampingi Kadis Kesehatan I Komang Adi Sujendra, Kepala Balai POM Palu Agus Riyanto dan Kepala BKKBN Sulteng Maria Ernawati di Kota Palu, Jumat (8/10/2021).

Foto: Oji/Man

Anis Byarwati: Sang Dosen yang Berjuang Di Panggung Politik

Hidup Anis Byarwati sejak kecil memang jauh dari kata susah, namun bukan berarti kesuksesan yang diraihinya hingga saat ini bisa didapat begitu saja dengan mudah. Dinamika kehidupan berkeluarga dan berumah tangga menjadi "tantangan" tersendiri bagi Anis dalam meniti karir plus perjuangannya meraih cita-cita. Berikut kisahnya yang dipaparkannya hanya pada Rahayu dan Naefuroji dari *Parlementaria*.



“Bahagia” merupakan satu kata yang paling utama diucapkan Anis saat ditanya masa-masa kecilnya. Ya, Anis merasa bersyukur dilahirkan dalam keluarga besar yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Betapa tidak, terlahir sebagai anak pertama dari kedua orangtua yang juga merupakan anak pertama. Tak berlebihan jika kemudian, ia sebagai cucu pertama di keluarga besarnya kerap menjadi perhatian bahkan bisa dikatakan selalu mendapat prioritas dari kedua kakek nenek, serta om-om dan para tantenya.

“Jadi, om saya yang belum menikah dulu kalau mereka habis gaji, sampai *ngantri* untuk ngajak saya jalan-jalan. Misalkan hari ini giliran om ini ngajak ke mana, besok giliran om saya yang lainnya. Belum lagi kakek dan nenek saya yang semuanya ada satu rumah dengan saya, seperti di Asrama. Bisa dikatakan saya hidup dikelilingi keluarga besar yang sangat mencintai saya, atau penuh dengan cinta,” aku Anis Byarwati kepada **Parlementaria**.

Kondisi tersebut tidak serta merta membuat Anis menjadi pribadi yang manja. Pasalnya, kedua orangtua Anis meski sibuk bekerja, namun selalu memperhatikan dan ikut medidik Anis yang saat itu masih menjadi anak semata wayang. Sang Ibu yang seorang guru Taman Kanak-kanak (TK) di bilangan Blok R Jakarta Selatan tak lupa untuk tetap mengajarkan Anis menulis dan mengenal huruf dan angka. Tak heran, belum sekolah, Anis kecil sudah bisa menulis dan membaca.

Bahkan uniknya, saat kedua orangtuanya bekerja, Anis di rumah dibiasakan untuk menulis apa saja yang dilakukannya selama kedua orangtuanya bekerja. Secara tak langsung, hal itu tak hanya sekedar membiasakan Anis lebih mengenal huruf dan angka, namun juga melatihnya mengarang sebuah cerita (kisah nyata kegiatan yang dialaminya di hari itu). Sore atau malam harinya, sekembalinya kedua orangtuanya dari



Anis Byarwati di ruang kerjanya. Foto: Oji

bekerja, Ibu Anis tak lupa membaca dan mengoreksi tulisan Anis. Misalnya kurang kata penghubung dan sebagainya.

Melihat kemampuan anaknya yang sudah bisa membaca dan menulis, bahkan mengarang cerita itu, Ibu Anis lalu memasukan anaknya ke sekolah dasar (SD) meski saat itu ia belum berusia lima tahun. Awalnya, Anis ditolak kepala sekolah karena khawatir Anis tidak bisa mengikuti pelajaran SD, mengingat usianya belum genap lima tahun. Singkat cerita, Ibu Anis berhasil meyakinkan kepala sekolah tersebut, dengan catatan bahwa pihaknya tidak memperlumahkan jika kelak anaknya tidak naik sekolah, karena tidak bisa mengikuti pelajaran.

Di luar dugaan kepala sekolah, Anis tidak hanya bisa mengikuti pelajaran, tapi menjadi salah satu siswa dengan nilai terbaik. Di SD, Anis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband dan seni. Bahkan ia juga sempat menjuarai lomba baca puisi tingkat SD. Dari sana, proses belajar di sekolah Anis pun lancar hingga berhasil menyelesaikan sekolah, lulus SD dengan nilai yang cukup baik. Saat itu mulai muncul keinginan dan cita-cita Anis untuk menjadi seorang guru, mengikuti jejak kedua orangtuanya.

AKTIF ORGANISASI SEKOLAH

Memasuki usia SMP, Anis tidak hanya dipilih menjadi Ketua Kelas, ia pun mulai aktif di OSIS. Ya, kedua orangtua Anis memang sangat mendukung anak-anaknya, terutama Anis untuk ikut berbagai kegiatan di sekolahnya.

Memasuki dunia kampus, Anis yang sangat menyukai bidang ekonomi dan akuntansi memilih untuk kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP). Di sana, ia bergabung dalam organisasi kampus Resimen Mahasiswa (Menwa) dengan tujuan untuk melatih disiplin. Mengingat saat itu Menwa menjadi salah satu organisasi kemahasiswaan yang sangat rapih. Dengan kata lain, di jaman itu (tahun 1985-**red**) Menwa menjadi salah satu organisasi kampus yang benar-benar diberi kepercayaan untuk mengondisikan mahasiswa sebagai generasi penerus untuk memiliki kedisiplinan dan membentuk jiwa ksatria.

Meski selalu mendukung segala aktivitas dan kegiatan Anis, bukan berarti kedua orangtuanya membebaskan sepenuhnya pergaulan sang anak. Mereka tetap mengawasi dan menjaga Anis. Sang Ayah selalu mengantarkan dan menjemput Anis dimana pun berada. Termasuk ketika



Anis bersama suami. Foto: dok/nvl

Anis belajar bersama atau sekedar main di rumah temannya.

“Sejak SMP sudah begitu ya. Bapak saya kan kalo dateng, jemput atau antar saya itu pakai kacamata hitam, terus rambutnya juga dikebelakangin. Kebetulan saat itu sedang tren film Detektif *Hunter*. Nah, temen-temen saya udah tau kalau ada mobil datang langsung bilang *hunter dateng, hunter dateng* jemput Anis,” kisah Anis diiringi tawa.

KULIAH, MENIKAH DAN BERKARIR

Tahun 1988 Anis berhasil menyelesaikan kuliah di APP. Setahun kemudian ia menikah dengan H.M. Isbir Renwarin yang notabene teman dakwahnya sendiri. Lucunya, sebelum menikah, ayah Anis sempat berpesen kepada calon menantunya itu. “Anak saya ini hobinya sekolah, jadi saya berharap setelah menikah pun dia

bisa melanjutkan sekolah,” ujar Anis menirukan ucapan sang ayah kepada calon suaminya kala itu.

Itu tentu menjadi harapan tersendiri bagi Anis untuk tetap bisa mewujudkan cita-citanya menjadi guru (dosen-**red**). Namun, kenyataan tak seindah harapan. Meskipun sang suami membebaskan Anis untuk kembali melanjutkan perkuliahan dan mewujudkan cita-citanya, tugas dan tanggung jawab sebagai isteri dan seorang ibu secara tidak langsung menuntutnya untuk lebih mengutamakan keluarga dibanding apapun, termasuk kuliah dan karir.

Sambil mengurus buah hatinya, Anis mencoba mengambil kursus bahasa Inggris dan Arab. Hingga kemudian beberapa tahun kemudian ia kembali melanjutkan kuliah, mengambil S1 di STIA At Taqwa ketika ia memiliki tiga orang buah hati.

Singkat cerita, ia pun terus melanjutkan program pasca sarjana tentang kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, ketika ia sudah memiliki delapan orang anak. Dilanjutkan dengan program doktoral tentang ekonomi syariah Islam di Universitas Airlangga.

Anis pun berhasil mewujudkan cita-cita kecilnya menjadi guru. Ia sempat mengajar di Universitas Al Azhar sekali dalam seminggu. Serta program Sarjana dan Pasca Sarjana di Universitas Yarsi, Jakarta. Bahkan ia sempat terpilih menjadi Dekan di Universitas tersebut.

“Saya baru meninggalkan rumah setelah anak-anak sudah besar. Jadi sebelumnya memang *full* sebagai *house wife*. Saya keluar rumah dalam arti kembali berkarir sebagai dosen tetap tahun 2013, sebelumnya hanya seminggu sekali di Al-Azhar. Tapi setelah selesai doctor Tahun 2013 dimana anak bungsu saya sudah berusia 9 tahun saya baru kembali aktif di berbagai kegiatan,” jelas wanita kelahiran Jakarta, 9 Maret 1967 ini.

**JIKA SAYA MENJADI
ANGGOTA PARLEMEN
ATAU DPR YANG
CAKUPANNYA
NASIONAL,
MAKA TINGKAT
KEMANFAATAN
PRAKTISAN SAYA
ITU AKAN JAUH
LEBIH BESAR. JADI
BAGAIMANA KITA BISA
BERPERAN LANGSUNG
MEMPERBAIKI BANGSA**

MASUK PANGGUNG POLITIK

Sama-sama menjadi aktivis dakwah memudahkan langkah Anis untuk menyamakan visi dan misi ke depan bersama sang suami. Termasuk kiblat politiknya untuk bisa memperjuangkan apa yang telah menjadi visi dan misinya ke depan.

“Jadi saya mulai dari kampus, bergabung dalam komunitas pengajian di kampus, bahkan bertemu dengan suami dan akhirnya menikah juga dari komunitas dakwah ini. Hingga kemudian di saat bersamaan berdiri PKS yang notabene saya lihat semua apa yang saya cita-citakan tentang Islam, tentang Negara dan bangsa ini ada di PKS. Selain itu teman-teman PKS rata-rata teman pengajian juga, akhirnya saya bergabung dengan PKS sejak pertama PKS berdiri,” tuturnya.

Oleh PKS, Anis ditugaskan menjadi caleg (calon legislatif) melalui proses penjurangan. Ia terpilih diantara kader-kader yang berada di Jakarta timur untuk mewakili Jakarta timur. Artinya apa yang ditugaskan

oleh partai itulah yang akan dijalannya dengan sungguh-sungguh dan niat yang benar. Sementara, perkara hasilnya itu ia serahkan kepada Allah SWT. Dan *Qadratullah*, Anis terpilih menuju Senayan mewakili masyarakat daerah pemilihan Jakarta Timur.

“Kalau melihat kondisi Indonesia ini kan sangat banyak yang harus diperbaiki, tapi dari mana perbaikannya, kalo kita berperan sebagai dosen, memang bisa memperbaikinya atau merubahnya, namun dalam skala kampus. Sementara jika saya menjadi anggota parlemen atau DPR yang cakupannya nasional, maka tingkat kemanfaatan praktisan saya itu akan jauh lebih besar. Jadi bagaimana kita bisa berperan langsung memperbaiki bangsa ini dari sisi kompetensi kita

dan untuk itulah Allah memberikan Amanah itu,” tukasnya.

Menjadi anggota legislatif yang notabene memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tentu banyak menyita waktu dan konsentrasi Anis. Ditambah dengan profesi sebelumnya, mengajar untuk program pasca sarjana di Yarsi. Belum lagi profesi utamanya menjadi seorang ibu dari delapan orang putra-putri, tentu bukan hal yang mudah bagi Anis.

“Alhamdulillah, Allah SWT memudahkan semuanya. Suami dan anak-anak saya yang *support* luar biasa, mau berbagi perhatian dan pekerjaan rumah bersama-sama. Ditambah dengan tim yang luar biasa, hingga semua kegiatan saya bisa berjalan dengan baik, dan lancar. Untuk mengajar saya memilih hanya satu kali dalam sepekan untuk masing-masing program sarjana dan pasca sarjana,”pungkas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini. ● ayu/es





Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno. Foto: Hanum/nvl

Komisi I Serius Perhatikan Sektor Pertahanan

TNI memiliki peran penting sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan nasional sekaligus menjaga keutuhan NKRI sebagai Negara berdaulat. Komisi I DPR RI memberi perhatian khusus atas pemenuhan anggaran bagi sektor pertahanan negara.

Menjaga ketahanan nasional dari berbagai macam ancaman tentu memerlukan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mumpuni dan unggul. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno mengatakan alutsista

menempati posisi yang sangat penting karena sebagai salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara.

Kondisi alutsista milik TNI yang sudah tua pun menjadi perhatiannya. Ia mendorong modernisasi serta peremajaan alutsista milik TNI. “Kita

punya kapal-kapal yang sangat tua, itu harus kita remajakan. Artinya diganti dengan yang baru. Walaupun belum bisa, yang ada harus dirawat dengan baik sehingga layak untuk beroperasi,” terangnya usai memimpin pertemuan Tim kunspek Komisi I DPR RI dengan Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto beserta jajarannya di KRI Dewaruci, Koarmada II Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Tak hanya dari Anton, dukungan serta dorongan modernisasi dan peremajaan alutsista TNI juga muncul dari Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan. Ia melihat modernisasi dan peremajaan tersebut akan memberi dampak positif bagi TNI baik matra darat, laut dan udara dalam mengemban tugas dan fungsinya serta untuk mencapai *Minimum Essential Force (MEF)*.

Atas hal itu, ia menekankan alokasi anggaran yang memadai memiliki peran penting agar operasional TNI dapat berjalan maksimal. Sjarifuddin memastikan DPR RI pun berkomitmen untuk memberi dukungan melalui kebijakan dan dukungan politik anggaran.

“Komisi I telah membentuk Panja Alutsista dan Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit. Muara dari kedua Panja tersebut adalah penguatan TNI dalam mengemban tugas dan fungsi melalui ketersediaan alutsista yang ideal dan pemenuhan kesejahteraan prajurit,” tutupnya.

ANGGARAN BELUM MAKSIMAL

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas pun prihatin atas belum maksimalnya alokasi anggaran di sektor pertahanan. Ia menyebut, idealnya kebutuhan akan pertahanan Indonesia harus bisa dipenuhi oleh pemerintah. Yan Permenas menjabarkan kebutuhan tersebut tidak melulu soal alokasi anggaran untuk alutsista, melainkan juga terkait penambahan personel dan pengembangan organisasi.

“Kita melihat kondisi hari ini, TNI belum mendapat alokasi anggaran

yang maksimal. Sehingga dari aspek dari kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari Minimum Essential Force (MEF) yang kita punya,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VI Makassar, Sulawesi Selatan.

Legislator fraksi Gerindra itu melihat, selama ini aspek kebutuhan kebutuhan organisasi, pemenuhan personel, kemudian pemenuhan alutsista masih belum mencapai 100 persen dari MEF. “Kita baru mencapai 60 persen. Dan 60 persen juga belum tentu bisa menjawab tingkat kebutuhan di satuan-satuan organisasi yang paling bawah. Mungkin ini perencanaan di tingkat atas, kita lihat secara kasat mata dengan estimasi hitungan 60 persen tapi kalau kita detailkan dengan melihat tingkat kebutuhan di tingkat bawah, pasti 60 persen itu pasti masih human error. Saya yakin masih 40 persen sampai dengan 38 persen yang bisa kita penuhi,” jelasnya.

Atas hal itu ia meminta adanya penghitungan kembali secara detail serta analisa berdasarkan berbagai macam dampak ancaman, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan

tetap melihat kondisi-kondisi yang dihadapi selama ini.

TNI HARUS SAMPAIKAN KEBUTUHANNYA

Dukungan anggaran tersebut pun harus ditanggapi oleh pihak TNI diantaranya dengan melakukan pemetaan terkait hal-hal prioritas yang dibutuhkan oleh TNI. Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan menilai sejauh ini, TNI masih dirasa kurang transparan dan terkesan malu-malu untuk mengutarakan apa saja yang menjadi kebutuhannya. Hal itu pun menjadi keprihatinan tersendiri dari legislator Senayan tersebut.

Sturman mencontohkan apa yang dilakukan oleh Kapolri dimana ada satu daerah pemekaran baru muncul, maka akan dibangun satu Polres. Melihat hal itu, sikap TNI untuk mengembangkan potensi pun menjadi atensinya. Ia menekankan pentingnya transparansi akan hal-hal yang dibutuhkan oleh TNI.

“Supaya kita dilihat. Kalau tidak, Pak, TNI, anda tidak akan pernah bisa berkembang, kembangkan dirimu, jangan ragu, jangan malu-malu,” tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.



Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Foto: Fitri/nvl

Untuk itu, Sturman menekankan bahwa TNI tidak perlu ragu-ragu dalam mengajukan anggaran yang dibutuhkan dalam operasional maupun pengembangan diri. Hal itu dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara strategis dengan kekayaan alam melimpah sehingga TNI tidak boleh kalah bersaing dengan kekuatan negara maritim lainnya. • hnm,srw/es



Foto Bersama Tim Kunker Komisi I DPR RI di Lantamal VI Makassar. Foto: Fitri/nvl

Komisi II Pastikan Pelayanan Pemerintah Hingga Desa

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Sebagai wakil rakyat, Komisi II DPR RI perlu memastikan masyarakat hingga tingkatan mikro tetap mendapatkan pelayanan dari pemerintah.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Ariel/man

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa berharap pembangunan di desa terus bergulir dan berkeadilan sehingga menjadi basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang cukup

besar kepada desa dalam mengelola urusan rumah tangga desa, termasuk pemberian alokasi dana desa yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan potensi yang dimiliki,” ujar Saan saat pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di kantor Pemda Purwakarta, Jawa Barat, akhir September lalu.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menuturkan, Kabupaten Purwakarta yang memiliki 192 desa, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah sebagai pembina desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Karena kemajuan suatu desa

merupakan tolak ukur suksesnya pembangunan suatu daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, salah satu prioritas pemerintah yaitu melindungi masyarakat desa dengan melengkapi sarana dan prasarana.

“Dalam rangka mempermudah pengambilan kebijakan terkait pembangunan serta pemberdayaan desa, Pemda Purwakarta bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) membuat pusat data informasi (Pusdatin Desa) sebagai informasi terpusat tentang Desa,” ungkapnya.

PANTAU IMPLEMENTASI UU DESA

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa paradigma baru. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, namun UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah desentralisasi kewenangan negara kepada masyarakat untuk membangun dirinya melalui penguatan pemerintahan desa dan seluruh masyarakat yang ada di bawahnya.

“Di sini, Pemerintahan Kabupaten Subang berfungsi sebagai pembina langsung kepada desa. Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab menyusun regulasi yang menjadi acuan dalam rangka melakukan pembinaan kepada Desa,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Sekda Kabupaten Subang, di Kantor Bupati Subang, Jawa Barat.

Politisi Fraksi PPP itu mendapati informasi, meskipun desa telah mendapatkan kucuran dana desa yang



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal bertukar cenderamata dengan Sekda Subang, Jawa Barat. Foto: Andri/man

besar, penyelenggaraan pemerintahan desa di Subang belum optimal. Performa desa belum banyak berubah. Banyak kendala yang dihadapi, mulai minimnya regulasi, tata kelola pemerintahan yang belum profesional, hingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang masih rendah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menambahkan APBN untuk membangun 74.953 desa dengan jutaan SDM di dalamnya sudah digelontorkan sejak tahun 2015 dengan jumlah alokasi yang besar. Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun; tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 triliun, tahun 2020 sebesar Rp71,19 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Namun Syamsurizal menilai pembangunan di desa belum maksimal.

“Melihat dari beberapa permasalahan yang kita dengarkan, ada dua masalah besar. Pertama, kebutuhan perangkat regulasi untuk penguatan tata kelola pemerintahan desa. Tanpa regulasi yang cukup, pemerintahan desa akan sulit untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan dan

pelayanan yang baik. Kedua, kebutuhan peningkatan SDM aparatur desa agar lebih berintegritas, akuntabel dan profesional,” ungkap Syamsurizal.

OTONOMI DESA HARUS LEBIH JELAS

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan desa harus diberikan otonominya secara jelas dan konkret. Otonomi desa muncul ketika desa itu lahir. Selama ini, regulasi belum

mengatur secara jelas pemberian otonomi tersebut, sehingga para kepala desa tidak leluasa mengelola pemerintahan dan dana desa.

“Perlu dibuka kemungkinan untuk dilakukan revisi UU Desa, sehingga pengakuan hak otonomi desa lebih nyata. Saat ini, tuntutan masyarakat ke pemerintahan desa semakin besar. Ke depan perlu dipikirkan pula untuk penambahan alokasi dana desa,” kata Hafid. usai mengikuti pertemuan Komisi II DPR RI dengan Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan, di Soreang, Bandung, Jawa Barat.

Soal dana desa, misalnya, pemerintah desa perlu diberikan hak diskresi dalam mengelola dana desa, selama masih ada kekosongan hukum, para kepala desa bisa mengambil hak diskresi atas pengelolaan keuangan desa.

“Perlu ada perlindungan bagi para kepala desa untuk mengambil diskresi dalam penggunaan dana desa. Kalau tidak dilakukan, tentu itu akan membuat kepala desa jadi bulan-bulanan publik. Padahal, kebutuhan masyarakat begitu besar, sementara juknis penggunaan dana desa sangat ketat. Di sinilah perlu ada diskresi bagi para kepala desa dalam mengambil kebijakan pengelolaan APBDes,” jelas Hafid. ●

afr,mh,man/es



Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan mitra kerja di Bandung, Jawa Barat. Foto: Husen/man



Tim Kunspek Komisi III DPR RI berfoto bersama dengan Kapolda Sumatera Barat. Foto: Dipa/mvl

Komisi III Tekankan Akselerasi PEN dan Vaksinasi

Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan mitra kerja di Sumatera Barat dan di D.I. Yogyakarta guna memastikan percepatan vaksinasi dan akselerasi program PEN tidak menyimpang pemanfaatannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, saat pertemuan dengan jajaran Polda

Sumatera Barat menegaskan agar Kapolda Sumbar elakukan akselerasi percepatan vaksinasi kepada seluruh penduduk di Sumbar.

“Dalam penjelasan Kapolda, bahwa hal-hal yang sangat krusial terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di Sumbar, sebagaimana kita ketahui, jumlah penduduk Sumbar ini 5,5 juta jiwa. Sementara sementara wajib vaksin itu 4,4 juta jiwa. Tetapi hingga semester

ini, yang telah mendapat vaksin sekitar 12,4 persen, kurang lebih angkanya di bawah 1 juta orang,” ujar Pangeran di Mapolda Sumbar, baru-baru ini.

Selain itu, Pangeran juga menekankan agar Kapolda beserta jajarannya untuk lebih cepat dalam mendapatkan data dan informasi yang seluas-luasnya, serta masukan terkait PEN di Sumbar, melihat potensi persoalan hukum pada masa pandemi Covid-19 dan isu aktual yang berkembang di masyarakat Sumbar.

“Kita tegaskan terkait adanya penimbunan obat-obatan, kita minta kepada Kapolda beserta jajarannya

untuk menindak tegas. Bagusnya, sejauh ini Polda telah melakukan upaya kolaborasi dan kerja sama dengan dinas-dinas pengguna anggaran, baik dinas provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Pangeran.

Ia berharap agar PEN di Sumbar segera dilakukan percepatan. Ia tidak ingin kebocoran keuangan negara terjadi lagi, serta penyelewengan dan penyimpangan untuk memaksimalkan hadirnya negara. Maka dari itu, Pangeran ingin semua pihak turun langsung membantu masyarakat di masa pandemi ini.

“Kita berharap hal ini terus dilakukan dan dipercepat untuk menjadi bahan dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif. Di luar itu, sekaligus dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan, sehingga proses PEN dapat cepat berjalan di masa pandemi

ini,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I itu.

APRESIASI VAKSINASI POLDA D.I.Y

Sementara itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan Covid-19.

Ia pun mengapresiasi capaian penanggulangan Covid-19 dan vaksinasi oleh Polda D.I.Y, meskipun banyak hal yang perlu diperbaiki, dalam hal faktor eksternal Polri dan jajaran yang lainnya.

“Seperti yang disampaikan (dalam pertemuan), misalnya soal vaksinasi, angkanya kan sudah luar biasa di Yogyakarta ini. Di mana tingkat vaksinasi itu sudah jauh dari rata-rata nasional, karena di sini sudah mencapai 80 persen lebih. Ini yang kemudian kalau diselenggarakan itu akan sangat tergantung juga dari pasokan vaksin itu sendiri, yang itu tentu di luar tugas atau kewenangan dari jajaran Polri yang ada di sini untuk pengadaannya,” ungkap Arsul usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar, di Mapolda D.I.Yogyakarta..

Politisi Fraksi PPP itu juga mengungkapkan, Komisi III mendukung Polda DIY untuk berperan pada berlangsungnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah PPKM.

“Kegiatan pariwisata di Yogya ini mulai menggeliat bahkan ramai, teman-teman juga bilang lebih ramai dari Bali. *Kan* artinya untuk Yogyakarta ini sebetulnya jajaran Polri juga mengikuti kebijakan yang disampaikan Pak Kapolda, termasuk dalam konteks untuk masuk kembali sekolah dalam rangka PTM (Pembelajaran Tatap Muka),” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengapresiasi sinergi Polda D.I.Yogyakarta dengan pemerintah setempat terkait penerapan PTM di Yogyakarta. Dimana, dari penjelasan Kapolda, kebijakan PTM itu akan menyesuaikan dengan instruksi Gubernur. Karena pemerintah daerah yang harus mempertanggungjawabkan secara administratif dan kepolisian mempertanggungjawabkan dari segi keamanannya.

“Apa yang dijelaskan Pak Kapolda dalam pertemuan Kunjungan Spesifik Komisi III ini adalah hal yang sangat bagus sekali, karena Polda menjalin



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Aisyah/nvl

komunikasi terus dengan pemerintah setempat. Saya kira kita apresiasi semua itu. Ke depan, semoga daerah-daerah lain yang akan kami kunjungi berikutnya bisa mendapatkan kira-kira respon dengan tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutup politisi Partai Golkar itu. • [dip,ais/es](#)



Tim Kunspek Komisi III DPR RI foto bersama dengan Kapolda D.I.Yogyakarta. Foto: Aisyah/nvl

Komisi IV Tinjau Sektor Pertanian hingga Kehutanan

Komisi VI DPR RI menjalankan fungsi pengawasan ke beberapa daerah. Adapun sektor yang ditinjau diantaranya, sektor pertanian dan kehutanan. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga menyerap aspirasi terkait RUU KSDAE.

Pada momentum peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2021 ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberi apresiasi kepada para petani Indonesia di berbagai daerah. Ia mengajak semua pihak untuk terus memberi perhatian dan dukungan kepada petani Indonesia seperti berupa alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi dan infrastruktur pertanian.

“Karena petani bisa dikatakan bagaikan malaikat. Kebayang nggak sama kita, kalau petani Indonesia tidak mau bekerja. Maka itu, pemerintah maupun Komisi IV harus memberikan apresiasi dalam bentuk perhatian dan dukungan,” kata Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten, penghujung September lalu.

Ditekankan Sudin, baik pihak eksekutif, legislatif, hingga pemerintah daerah maupun stakeholder, tidak boleh menutup mata atas problematika yang dihadapi oleh petani. Seperti soal stabilitas harga, Sudin mencontohkan pada komoditas jagung dimana pada



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Foto: Fitri/mvl

saat ini harga panen jagung cukup baik, namun ada kala saat panen harga komoditas tersebut menjadi jatuh dan menyengsarakan para petani.

“Produksi mereka (petani) jangan sampai jatuh. Jangan sampai petani sudah bekerja keras, subuh sampai sore di sawah, tapi hasilnya minim,” tegas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

OPTIMALKAN PENYUSUNAN RUU KSDAE.

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAE) Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi legislasinya untuk menyerap secara langsung aspirasi dari masyarakat adat, guna mengoptimalkan penyusunan RUU KSDAE.

“Kunjungan hari ini adalah menggali sedalam-dalamnya mengenai apa yang

perlu dilakukan dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin pertemuan Tim Panja RUU KSDAE Komisi IV DPR RI dengan perwakilan masyarakat adat di Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, aspirasi masyarakat adat yang terlibat secara langsung dengan kawasan konservasi alam dinilai sangat penting dalam upaya mendalami berbagai hal dalam RUU KSDAE.

Diakui Dedi, pihaknya mendapat berbagai masukan usai menggelar diskusi dengan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul yang tinggal di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun, Kabupaten Sukabumi. “Kita secara komprehensif, banyak mendapatkan masukan-

masuk (terkait RUU KSDAE), terutama dari kalangan kasepuhan-kasepuhan masyarakat adat,” tuturnya.

Masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi diketahui memiliki peranan penting dalam upaya menjaga ekosistem alam. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat Banten Kidul yang masih mempertahankan adat istiadat lama dan hidup secara harmonis dengan alam tempat tinggal mereka bahkan sejak ratusan tahun lalu.

Oleh karena itu, Dedi menilai pentingnya perlindungan bagi hak masyarakat adat dengan kawasan tempat tinggalnya, sehingga masyarakat bukan hanya mampu terus hidup secara harmonis dengan alamnya, namun juga berkontribusi terhadap upaya menjaga alam.

MANFAATKAN BEKAS KARHUTLA

Sementara itu di Majalengka, Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengusulkan agar lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Menurut Sutrisno,



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunspek Panja RUU KSDAE di Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Rizki/nvl

MPA bisa diberikan fasilitas seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau yang dikenal dengan ‘Bang Pesona’.

Sutrisno menjelaskan KBR dimaksud adalah pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau

tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

“Saya mengusulkan agar lahan bekas kebakaran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota MPA,” kata Sutrisno usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi KLHK, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Bupati Majalengka, serta MPA, di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Diketahui, ‘Bang Pesona’ adalah bentuk upaya pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong agar masyarakat bisa menjalankan usaha Perhutanan Sosial hingga memberikan nilai tambah bagi produk mereka. Sehingga ekonomi masyarakat pun, akan mampu bertahan di saat melemahnya ekonomi global karena serangan pandemi Covid-19. ● qq,rr,srw/es



Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak saat mengikuti kunspek ke Lembang. Foto: Chasbi/nvl

Komisi V Dorong Penguatan Basarnas

Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pengelolaan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Minimnya infrastruktur menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan operasi SAR (Search And Rescue) yang efektif di pada daerah rawan bencana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi penanganan cepat, handal, dan aman saat terjadi musibah kepada Badan SAR Nasional (Basarnas) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Banten. Penanganan musibah yang telah ditangani Basarnas Banten tersebut, mulai dari musibah di bidang pelayaran, penerbangan, maupun bencana alam lainnya.

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BASARNAS Banten yang selama ini telah melakukan pelaksanaan operasi SAR, khususnya di wilayah Banten dan Selat Sunda pada setiap musibah dengan cepat, handal, dan aman,” kata Syarif saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Kantor Basarnas Banten, di Serang, Oktober lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI ingin melihat secara langsung kondisi riil fasilitas, sarana-prasarana

hingga Sumber Daya Manusia (SDM) SAR yang dimiliki BASARNAS Banten, termasuk langkah-langkah penguatan dan pengembangan infrastruktur operasi SAR serta kesiapan sumber daya manusianya.

Dari hasil peninjauan, Syarif menilai ada beberapa aspek pengawasan yang perlu ditingkatkan. Komisi V DPR RI mengharapkan penyelenggaraan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal. Hal ini perlu ditingkatkan sebab masih sering terjadi kecelakaan pelayaran dan penerbangan.

“Juga penerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka menyelamatkan korban bencana tersebut,” jelasnya.

APRESIASI KINERJA BASARNAS DAERAH

Di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae juga mengapresiasi kesiapan personel Basarnas Bandung. Meski demikian, ia melihat luas wilayah dan minimnya personel masih jadi hambatan yang harus dihadapi Basarnas Bandung dalam setiap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah Jawa Barat.

“Ada jarak dari kantor SAR Bandung sampai Posko Siaga di daerah terdampak, kurang lebih 7-8 jam perjalanan dan juga kurangnya personel,” analisa Ridwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor SAR Bandung, di Sumedang, Jawa Barat.

Adapun Basarnas Bandung bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAR di Region Pencarian dan Pertolongan wilayah Jawa Barat. Diketahui semua daerah kota dan kabupaten di Jabar merupakan wilayah resiko tinggi dan rawan bencana alam terutama saat musim hujan.

Untuk itu, Ridwan menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI yang salah satunya membidangi ruang lingkup pencarian dan pertolongan akan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie (baju putih) saat meninjau sarana prasarana Kantor Basarnas Banten.
Foto: Ridwan/rw



Tim Kunspek Komisi V DPR RI berfoto bersama jajaran Basarnas Bandung. Foto: Rizki/nvl

menindak lanjuti temuan tersebut dalam rapat-rapat yang akan dilakukan dengan mitra kerja terkait. “Komisi V secara arif akan menyampaikan masalah-masalah yang ditemukan waktu rapat bersama mitra Komisi V,” sebut legislator dapil Sulawesi Tenggara itu.

Ia juga menambahkan, Komisi V DPR RI juga akan mendorong pemerintah untuk melakukan penambahan fasilitas berupa kantor dan posko di sejumlah wilayah serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Basarnas.

“Tujuan Basarnas adalah menyelamatkan, kalau misalnya jarak tempuhnya begitu lama bagaimana bisa menyelamatkan orang? Oleh karena itu penambahan kantor sangat diperlukan,” pungkasnya.

SDM DAN SARPRAS PERLU DITINGKATKAN

Sementara itu, berdasarkan peninjauan proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai Pendidikan Latihan (Diklat) Basarnas Jonggol, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi berharap

kegiatan yang berlangsung dapat memberikan dampak positif dalam terus meningkatkan sumber daya manusia di Basarnas.

“Kita berharap dimulainya belajar tatap muka di Balai Diklat Basarnas Jonggol ini bisa memberikan dampak

yang positif, bagi upaya kita untuk mengejar dan terus meningkatkan sumber daya manusia di Basarnas,” ujar Arwani di sela-sela meninjau Balai Diklat Basarnas, di Cariu, Jonggol, Jawa Barat.

Politisi Fraksi PPP ini mengatakan, perlu ada peningkatan secara signifikan terkait kesiapsiagaan dalam pelayanan operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Terlebih *quick response search and rescue* merupakan salah satu program yang sudah dan terus diterapkan dalam memberikan pelayanan pencarian serta pertolongan seluruh masyarakat Indonesia.

Arwani juga mendorong agar jumlah sarana dan prasarana operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru. “Beberapa catatan yang kita soroti seperti rasio SDM dan kebutuhan terkait dengan pemenuhan tugas fungsi Basarnas masih kurang banyak, karena itu ini harus kita kejar ketertinggalan ini,” jelas Arwani.

Ke depan, pihaknya akan memperjuangkan alokasi anggaran bisa kita tingkatkan lagi, sebab masih banyak yang harus kita penuhi untuk menerapkan posisi Basarnas ini lebih baik. ● ann,rdn,rr/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meninjau proses kegiatan belajar mengajar tatap muka di Balai Diklat Basarnas. Foto: Anne/nvl

Komisi VI Awasi Kinerja Industri Semen dan Pupuk di Jatim

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI menyerap aspirasi dari sektor industri di Jawa Timur, yaitu dari PT Semen Gresik dan PT Petrokimia Gresik.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri) saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI ke PT Semen Gresik. Foto: Ica/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, hampir 75 persen dari industri semen nasional merupakan semen hasil produksi PT Semen Gresik. Untuk itu, PT Semen Gresik harus dapat mempertahankan pasar semen nasional melalui peningkatan ekspansi produksi dan memanfaatkan peluang dari pembangunan-pembangunan infrastruktur.

“Kita berharap pasca *recovery* Covid-19 ini, infrastruktur terus dipacu sehingga dapat menjadi peluang pasar yang demikian besar bagi industri semen, dan dapat memicu optimisme

pertumbuhan konsumsi semen di PT. Semen Gresik,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Aria yakin bahwa pertumbuhan konsumsi semen yang saat ini sudah meningkat sebanyak 4 persen ini akan tetap mengambil dari produksi semen dalam negeri, khususnya PT Semen Gresik. Ia optimis Semen Gresik akan tetap menjadi leading dalam konteks memenuhi kebutuhan semen nasional. Khususnya dalam menyelesaikan beberapa hal-hal yang belum terselesaikan karena pandemi Covid-19 dalam hal pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, politisi dapil Jawa Tengah V itu meminta PT Semen Gresik memberikan data audit tentang

kebutuhan semen nasional dan kemampuan produksi semen yang ada di Indonesia.

“Jangan sampai lonjakan-lonjakan yang dianggap meningkatkan berbagai produksi nasional semen di Indonesia ini, tidak dibarengi dengan demand/permintaan yang cukup signifikan, karena hal tersebut dapat menjatuhkan harga semen dan tidak begitu membuat efektif industri semen,” jelas Aria.

Ia menambahkan bahwa Komisi VI berkomitmen memberikan dukungan yang terbaik bagi PT Semen Gresik agar PT. Semen Gresik dapat melihat peluang besar pasar, khususnya dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur di masa pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

SEMEN GRESIK HARUS TINGKATKAN PENDAPATAN

Masih di Gresik, Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan kebutuhan konsumsi semen nasional yang juga berimbas pada penurunan pendapatan di sektor industri semen. Oleh karena itu, ia mendorong agar PT Semen Gresik dapat berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan.

“Untuk pasar Jawa-Bali itu sekitar 13 persen berkurangnya, kemudian secara kapasitas nasional berkurang 10 persen,” jelas Intan.

Intan berharap agar perusahaan pelat merah tersebut dapat meningkatkan upaya *captive market* guna mendapatkan pemasaran yang lebih tepat sasaran. PT Semen Gresik disarankan agar dapat melihat pangsa pasar, khususnya di wilayah Jawa-Bali yang saat ini perekonomiannya mulai kembali membaik.



Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi VI dengan PT Semen Gresik. Foto: Ica/nvi

“Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas produksi dan volume penjualan, kapasitas bahan baku-bahan baku semen juga perlu ditingkatkan kapasitas produksinya, karena geliat ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai terlihat, artinya permintaan untuk kebutuhan baku semen juga sudah mulai naik,” ungkap Intan.

Intan menyampaikan, Komisi VI DPR berharap agar BUMN Semen dapat terus meningkatkan kinerja, baik dari peningkatan produksi maupun pendapatan dari industri semen. “Kami berharap BUMN semen dan BUMN lainnya yang menjadi penunjang dari BUMN Karya, harus terus meningkatkan lagi kinerjanya, karena kita tahu salah satu sektor yang diutamakan di Indonesia ini adalah pembangunan infrastruktur,” tutup Intan.

JANGAN LAGI ADA KELANGKAAN PUPUK

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, dirinya tidak ingin mendengar adanya keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk. Menurutnya, selama ini ia cukup sering mendengar keluhan para petani mengenai kesulitannya dalam bercocok tanam.

“Karena itu, melalui kunjungan ini, kami (Komisi VI DPR RI) ingin memastikan pengelolaan dan distribusi pupuk khususnya yang akan di subsidi kepada masyarakat,” jelasnya usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan

Direktur Utama PT Petrokimia beserta jajarannya di Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Diketahui, PT Petrokimia telah melakukan beberapa upaya dalam penyaluran pupuk subsidi yaitu berkoordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten untuk mempercepat penerbitan SK Dinas serta penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan dasar alokasi terakhir pada tahun sebelumnya sambil menunggu SK Dinas terbit.

Di samping itu, Politisi Fraksi PPP pun menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI telah mendapatkan jawaban yang sudah diinventarisi oleh PT Petrokimia Gresik beserta solusi yang bisa dan akan dilakukan kedepannya dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

“Juga dalam hal ini, PT Petrokimia harus segera menyelesaikan tata kelola distribusi pupuk supaya tidak merugikan petani,” tegas politisi dapil Jawa Timur XI. Karena itu, Komisi VI DPR RI pun akan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut bersama Pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Pertanian. • ica,hnm/es



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI foto bersama dengan manajemen PT Petrokimia Gresik. Foto: Hanum/nvi

Komisi VII Dorong Percepatan Peralihan Menuju EBT

Ketersediaan energi fosil di Bumi sebagai sumber daya penghasil listrik dinilai sudah mengkhawatirkan. Dalam agenda kunjungan kerjanya, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari sumber tenaga lain yang tidak akan habis dan ramah lingkungan.



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI didampingi Founder Poso Energy Jusuf Kalla meninjau PLTA Poso I dan II di Poso, Sulawesi Tengah. Foto: Erman/vml

Dalam kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, energi yang berbasis fosil adalah salah satu penyumbang emisi karbon terbesar sehingga harus dikurangi secara bertahap. Sehingga, energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso yang dibangun oleh Poso Energy harus mulai dikedepankan.

Demikian disampaikan Sugeng usai pertemuan dengan Founder Poso Energy Jusuf Kalla, Dirut Utama Poso Energy Ahmad Kalla, Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir serta jajaran FORKOPIMDA Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, akhir September lalu.

„Kita ingin mengetahui *best practice*, pengalaman-pengalaman apa yang bisa digali dari Poso Energy dalam membangun PLTA untuk menjadi semacam percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka membangun

energi baru terbarukan. Dimana, PLTA adalah bagian dari energi baru terbarukan,“ ujar Sugeng.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini memaparkan, banyak manfaat yang dihasilkan dari keberadaan PLTA Poso. Selain sebagai sumber energi untuk kebutuhan listrik, juga berdampak pada berkurangnya emisi udara zat karbon. Sugeng pun menginginkan ke depan EBT bisa menjadi tiang penyangga energi di Indonesia. „Jadi kita konsen betul dengan *project-project* semacam ini (PLTA), karena kedepan energi baru terbarukan harus menjadi tiang penyangga energi kita,“ tandas Sugeng.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Joseph menilai, hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso merupakan sumbangsih yang besar dari Poso Energy dan Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk perkembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Dimana, saat ini seluruh dunia mulai diarahkan untuk beralih dari energi fosil menuju energi ramah lingkungan.

„Ini adalah salah satu PLTA yang sangat besar, khususnya di Sulawesi Tengah dan tentu untuk memenuhi energi, terutama listrik di daerah ini,“ ujar Willy.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dengan adanya PLTA Poso yang sudah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat akan segera menikmati era EBT. Ia juga memperkirakan PLTA Poso akan mampu meningkatkan capaian daya hingga 500 megawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Founder Poso Energy Jusuf Kalla mengatakan, kehadiran energi listrik adalah salah satu sumber kehidupan. Ia berpandangan, kehidupan tidak akan dikatakan maju tanpa kehadiran listrik. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan energi baru terbarukan yang andal dan dapat terus beroperasi.

BAURAN EBT HARUS DIPERCEPAT

Sementara itu, tim kunjungan kerja Komisi VII lainnya yang mengunjungi Provinsi Jawa Barat mengapresiasi keberadaan PT Sundaya Indonesia yang bergerak dibidang *solar energy*. Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sumber energi baru dengan memanfaatkan matahari yang mampu menghasilkan energi yang sangat besar hingga ratusan tahun ke depan.

“Kunjungan kita ke Kawasan Industri Sentul ini dimana salah satu tenant-nya adalah PT Sundaya Indonesia dari kata “sun” sebenarnya yang artinya matahari ya. Jadi Indonesia ini punya potensi matahari yang luar biasa. Kenapa tidak kita manfaatkan menjadi salah satu sumber energi? Padahal disampaikan oleh Pak Maurice (CEO PT Sundaya Indonesia) bahwa dengan matahari itu menghasilkan luar biasa sumber energi dan sampai 100 tahun pun enggak habis-habis,” ujar Andi Yuliani.

Politisi PAN ini melihat pemanfaatan energi matahari sejalan dengan program Kementerian ESDM yang berupaya mengakselerasi realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sementara saat ini bauran EBT baru tercapai sekitar 11 persen



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat mengikuti Kunspek Komisi VII ke Kawasan Industri Sentul. Foto: Tasya/nvl

sehingga perlu ada strategi yang tepat bagi pemerintah untuk merealisasikan sesuai target yang ditetapkan dalam waktu empat tahun ke depan.

“Nah tetapi perlu kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM bahwa target 23 persen di tahun 2025 itu harus segera dikejar karena sekarang ini di 2021 itu sisa empat tahun ya kita masih pada angka 11,9 persen. Padahal sisa empat tahun dari target pemerintah untuk mencapai bauran energi 23 persen,” terangnya

Wakil rakyat dapil Sulawesi Selatan II ini meminta keseriusan dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan EBT, khususnya pemanfaatan tenaga matahari. Pemerintah didorong

untuk mengidentifikasi perusahaan pengembang EBT di Indonesia dan membantu perusahaan tersebut dalam mengembangkan inovasi baru yang mampu menghasilkan EBT dan diharapkan pemerintah mengutamakan penggunaan produk dari dalam negeri.

Ia mencontohkan produk ‘Talis’ dari PT Sundaya Indonesia yang dapat menjadi pilihan pemerintah dibandingkan membeli produk impor yang dinilai lebih mahal. “Tentunya kita akan sampaikan pada pemerintah hasil Kunspek kita hari ini. Contohnya ada anggaran untuk pembelian Talis sebanyak 5000 buah. Tentu saya akan pertanyakan, beli Talis-nya dimana? Jangan sampai impor. Talisnya sudah ada di sini, kita kunjungi di PT Sundaya Indonesia sudah ada talis ini. Kenapa kita enggak beli di dalam negeri saja? Daripada impor,” tegas Andi Yuliani.

Pada kesempatan yang sama, CEO PT Sundaya Indonesia Maurice Adema mengatakan dukungan utama yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya regulasi terkait *supply and demand pricing*. Ia menilai regulasi ini diperlukan untuk mendorong penggunaan EBT, sebab akan mengatur tinggi rendahnya tarif PLN berdasarkan *supply and demand*. Kebijakan ini, disampaikan Maurice, sudah ditetapkan di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Australia, dan Selandia Baru. ● es,nap/es



Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Joseph. Foto: Erman/nvl

Serap Masukan UU Pesantren dan Pantau Persiapan PTM

Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung pada akhir September 2021 lalu. Dalam tinjauannya, Komisi VIII menyerap aspirasi terkait UU Pesantren, persiapan PTM di Madrasah serta pelaksanaan vaksinasi.

bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Maka dari itu dibutuhkan penyetaraan pendidikan, sarana prasarana, biaya operasional sehingga nantinya pesantren bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan cerdas ilmu.

“Jangan sampai kita menganggap pondok pesantren itu harus ditinggalkan tapi justru harus dirangkul dan diajak kerja sama. Maka dengan adanya UU Pesantren ini dengan sejumlah penyempurnaannya, insyaAllah saya yakin pesantren akan semakin sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain,” imbuh politisi PAN ini.

COVID-19 MENURUN, PTM PERLAHAN DAPAT DIBUKA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunspek ke Bandung Barat, Jawa Barat, menilai penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia semakin baik, yang ditandai dengan angka kasus positif yang perlahan sudah mulai menurun. Hal itu memungkinkan untuk sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), khususnya di sekolah madrasah, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Dunia pendidikan secara perlahan harus sudah dimulai dengan hadir fisik, proses pendidikan tatap muka harus dilakukan dengan perlahan. Untuk sekolah harus menyediakan fasilitas standart protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pendeteksi suhu tubuh, dan juga ruang isolasi untuk siswa yang sakit,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Ace menyebut, dalam pelaksanaan PTM, harus saling bersinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satgas Covid-19, agar bisa mengurangi risiko



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pesantren Riyadlul Jannah, Mojokerto. Foto: Tiera/mvi

Di Mojokerto, Jawa Timur, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI yang dipimpin dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyosialisasikan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Usai pertemuan dengan jajaran Pesantren Riyadlul Jannah, Yandri mengungkapkan banyak masukan-masukan yang diberikan oleh pihak

pesantren terkait UU Pesantren. Masukan tersebut di antaranya diperlukan adanya revisi atau perbaikan di beberapa pasal dalam UU Pesantren, termasuk turunannya.

“Dengan adanya perbaikan nantinya diharapkan keberadaan pesantren benar-benar bisa semakin baik, semakin maju dan juga semakin baik dalam memberi sumbangsih terhadap negara,” jelas Yandri.

Ia menekankan negara harus hadir untuk pesantren. Mengingat peran dari pondok pesantren yang luar biasa

terpapar Covid-19 dan madrasah tidak menjadi kluster baru penyebaran Corona. “Kami meminta agar sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua dan Satgas Covid-19 di jalankan dengan intens, agar setelah PTM dilaksanakan, tidak menjadi kluster Covid-19 baru di dunia pembelajaran,” pesan Ace.

DORONG PERCEPATAN VAKSINASI DI LAMPUNG

Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung, sehingga *herd immunity* masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai segera terbentuk. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama di Lampung baru mencapai 21,17 persen, atau sebanyak 1.407.067 orang yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama. Sementara Lampung menargetkan vaksinasi satu dosis sebanyak 6.645.226 orang.

“Kunjungan kami dalam rangka memberikan dukungan dalam percepatan vaksinasi di Lampung. Kita tahu sendiri, Lampung merupakan salah satu daerah yang masih rendah vaksinasinya,” ungkap Anggota Komisi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat pertemuan Kepala MAN Bandung Barat beserta jajaran. Foto: Azka/mv

VIII DPR RI I Komang Koheri usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk mendukung percepatan vaksinasi di Lampung, Komang memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pihak terkait lainnya agar vaksinasi di Lampung terus dapat meningkat. “Kami segera berkoordinasi dengan Menteri terkait dan Presiden langsung agar vaksin di Lampung dapat terus ditingkatkan,” komitmen politisi PDI-Perjuangan itu.

Pertemuan diakhiri dengan penyaluran bantuan dari Kementerian Agama oleh Komisi VIII DPR RI berupa mobil ambulans untuk pondok pesantren di Lampung, bantuan sebesar Rp210 juta untuk Pondok Pesantren Tribakti Alfalah, dana Rp50 juta untuk FKUB, dan dana Rp50 juta untuk PMII Lampung serta bantuan program keserasian sosial tahun 2021 dari Kementerian Sosial dan DPR RI sebesar Rp150 juta untuk FKS Nirwana Sejahtera Kampung Rama Nirwana. Selain itu Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan ATENSI kepada ratusan masyarakat Lampung di Dinas Sosial Provinsi Lampung. ● tra,azk,sf/es



Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri bertukar cenderamata dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto: Sofyan/mv

Komisi IX Pantau Realisasi Program BSU

Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap realisasi atau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja atau buruh yang terdampak pandemi di Bali, Makassar dan Bekasi.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan program yang menjadi fokus pemerintah bidang ketenagakerjaan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19, yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama pandemi Covid-19 melalui pemberian stimulus.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi terhadap program penyaluran

BSU yang berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial.

“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka (dapat) tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar

dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Felly.

Selain itu, dari anggaran sebesar Rp8,8 triliun yang pemerintah kucurkan untuk penyaluran BSU kepada 8,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta, terdapat dana yang belum terpakai sebesar Rp1,7 triliun. Dana tersebut merupakan sisa dana yang belum tersalurkan akibat terjadinya double data maupun kendala lainnya akibat perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020.

Terkait sisa dana yang kini berjumlah Rp1,7 triliun, Felly mengatakan bahwa semuanya tergantung keinginan dari pemerintah yang berkaitan dengan permen tersebut. Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi permen tersebut, karena masih banyak para pekerja terdampak yang justru membutuhkan bantuan tersebut, namun justru tidak dapat menerimanya.

MASIH ADA KENDALA PENYALURAN BSU

Di Bekasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, di antaranya komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron, sehingga mengakibatkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan secara cepat. Kedua, terkait dengan terbatasnya sumberdaya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif.

“Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh Kuasa Pengguna Anggaran,” ucap Charles.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, seluruh permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius dan harus segera ditindaklanjuti serta mendapatkan sebuah solusi segera mungkin guna memperbaiki



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX dengan Wakil Gubernur Bali.
Foto: Nadia/rvi



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI foto bersama di Kantor Bupati Bekasi. Foto: Geraldi/nvl

kelemahan-kelemahan yang selama ini menjadi permasalahan.

“Data dan informasi yang kami dapatkan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan penyaluran atau pelaksanaan program BSU,” tandas Charles.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengakui telah mendapatkan banyak masukan dari BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Serikat Pekerja, Dinas Tenaga Kerja serta dari instansi atau lembaga lainnya mengenai implementasi BSU.

“Mereka menyampaikan, terkait BSU cukup lancar, hanya memang ada aspirasi terkait pekerja yang terkena PHK dan akan menjadi bahan rapat kami dengan kementerian, termasuk juga pengawasan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi,” tandas Putih.

PEMERINTAH DIMINTA TIDAK DISKRIMINATIF

Di Makassar, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah adil dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh pekerja

yang terdampak Pandemi Covid-19. Ia menyesalkan para pekerja di Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh BSU lantaran perubahan Permenaker No

16 Tahun 2021 atas Permenaker No 14 Tahun 2020 yang salah satu poinnya menyebutkan, hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 saja yang berhak menerima BSU.

“Peraturan itu sesungguhnya sangat diskriminatif. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga membuat perbedaan untuk wilayah PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada jaminan bahwa di wilayah level 1 dan 2 tidak lebih parah dari level 4 dari ukuran keuangan,” ujar Ashabul Kahfi.

Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan atas peraturan tersebut dan menyalurkan BSU tidak hanya kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 saja, tetapi kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“Nah hari ini kan kita tahu bahwa ada sisa Rp1,7 triliun, jadi kita harapkan sisa dana dari Rp1,7 triliun ini untuk menjangkau 6 provinsi tadi yang belum mendapatkan, utamanya Sulawesi Selatan,” tegasnya. • opi,eki,ndy/es



Tim Kunker Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Eki/nvl

Komisi X Dukung Digitalisasi Perpustakaan

Komisi X DPR RI menyerap aspirasi ke beberapa perpustakaan di daerah dalam mengembangkan minat baca pengembangan pelayanan perpustakaan harus ditingkatkan yakni dengan pengembangan perpustakaan berbasis digital.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X di Kantor Gubernur Sumut. Foto: Rumi/ivi

Dengan Perpustakaan berbasis digital, masyarakat yang hobi baca akan lebih mudah untuk membaca di mana saja. Tidak hanya itu di era modern masyarakat sudah memiliki alat komunikasi yang cukup canggih, dengan demikian hadirnya perpustakaan secara digital sangatlah penting guna menunjang pengembangan Perpustakaan baik di daerah maupun pusat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong proses pengembangan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi. Saat ini sudah ada aplikasi *iPusnas* yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional. Dimana, aplikasi tersebut digunakan sebagai sebuah *platform* media sosial untuk mengakses *e-Bookstore* dan *e-Pustaka*.

Tak hanya itu *iPusnas* berguna untuk membangun jaringan atau komunitas sesama pembaca yang

memiliki beberapa fitur guna membantu pembaca agar semakin nyaman ketika membaca secara digital. Selain itu layanan untuk keanggotaan pun sudah lebih dipermudah.

Hetifah mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI guna mendengarkan sejumlah masukan terkait pengembangan perpustakaan di era digitalisasi, di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

“Dengan adanya aplikasi *iPusnas*, siapapun bisa mengakses berbagai bahan yang ingin masyarakat cari. Baik masyarakat yang tinggal di daerah ataupun kota. Dengan demikian adanya digitalisasi ini saya berharap akses masyarakat akan terbuka lebih luas, dan minat baca juga akan meningkat. Tentu saja dengan catatan, bahan-bahan (bacaan) yang ada juga memang disukai dan juga berkualitas,” jelas Hetifah.

INDEKS LITERASI HARUS DITINGKATKAN

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan data dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, tiga provinsi dengan nilai indeks literasi tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (58,16), Daerah Istimewa Yogyakarta (56,2), dan Kepulauan Riau (54,76).

Namun tiga provinsi tersebut belum mencapai kategori aktivitas literasi tinggi, karena indeksnya belum melampaui angka 80,01 atau sebenarnya masih berada di level aktivitas literasi sedang. Pada kondisi tidak normal, yaitu pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, indeks ini dikhawatirkan akan menurun. Fikri pun berharap dengan digitalisasi perpustakaan dapat meningkatkan minat literasi rakyat.

“Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan indeks membaca, melalui digitalisasi perpustakaan, maka Komisi X DPR merasa perlu melakukan pertemuan dengan beberapa pemangku



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Tim Kunspek Komisi X ke Balai Layanan Perpustakaan D.I.Yogyakarta. Foto: eko/mml

kepentingan bidang perpustakaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” papar Fikri saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Balai Layanan Perpustakaan D.I. Yogyakarta.

Dia pun mengungkapkan data Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, DI Yogyakarta memiliki 747 Perpustakaan Umum, 128 Perpustakaan Komunitas, 98 Taman Bacaan, dan 711 Perpustakaan Khusus. Sementara itu juga terdapat 3.025 Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan 26 Perpustakaan Perguruan Tinggi.

“Jumlah 4.483 perpustakaan yang di data Perpusnas tersebut, tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY, dan melayani 3.618.084 jiwa penduduknya,” ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

APRESIASI TINGGINYA MINAT BACA GENERASI MUDA SOLO

Di Solo, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi tingginya minat baca masyarakat muda Solo yang disampaikan Dinas Perpustakaan Daerah Solo. Menurutnya dalam kondisi pandemi

saat ini yang membatasi mobilitas masyarakat penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas perpustakaan digital, agar masyarakat dapat mengakses literatur yang sudah

digitalisasi dengan mudah dan ramah untuk berbagai kalangan, tanpa harus datang secara langsung ke gedung perpustakaan.

“Menurut laporan Dinas Perpustakaan Daerah Solo, minat baca terutama masyarakat muda itu tinggi, cuma sekarang (tinggal) bagaimana fasilitasnya perlu disiapkan untuk mereka. Dengan demikian minat baca tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik perlu diimbangi dengan fasilitas digitalnya maupun akses yang memudahkan untuk semua golongan, dalam hal ini tentu perpustakaan itu,” jelas Andreas saat mengikuti Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah.

Andreas menginginkan masyarakat, khususnya pelaku seni dan penulis buku dapat memenuhi kebutuhan literturnya melalui perpustakaan yang tersedia di Solo, walaupun ada internet di zaman modern ini. Menurut legislator dapi NTT I tersebut, literatur yang ada di perpustakaan lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dari internet. • mi,mri,eko/es



Tim Kunspek Komisi X DPR RI bertukar cinderamata dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Balaikota Surakarta. Foto: Tati/mml

Komisi XI Awasi Pembebasan Lahan Proyek PSN

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banten dan Jawa Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa agenda pokok yang dituju Komisi XI di antaranya pembebasan lahan di Waduk Karian.

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengingatkan pemerintah, khususnya dalam hal ini Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menyelesaikan permasalahan klasik berkaitan dengan pembebasan tanah dalam Program Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Waduk Karian di Provinsi Banten.

Ditemui usai memimpin Tim Kunspek Komisi XI, Eriko mendorong LMAN memberikan ganti untung kepada masyarakat sekitar pembangunan waduk yang berhak mendapatkan pemanfaatan program.

“Persoalan ini merupakan permasalahan klasik yang artinya di setiap wilayah yang dibangun proyek strategis nasional itu terdapat banyak kendala terutama pada persoalan tentang tanah. Berdasarkan dari pertemuan ini, hasil

evaluasi kami mendapati banyak temuan seperti masyarakat sekitar pembangunan Waduk Karian yang berhak mendapatkan ganti untung ternyata sampai belum mendapatkan. Bukankah seharusnya ganti untung yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat melalui Program Strategis Nasional,” tegas Eriko.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, Komisi XI DPR RI pada pertemuan itu juga mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sudah efektif dan tepat guna kepada masyarakat luas. Mengingat, Komisi XI DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang memberikan persetujuan untuk PMN tersebut terhadap LMAN dan Kemenkeu.

Eriko menekankan, LMAN jangan asal berdasarkan prosedural. LMAN wajib memastikan, masyarakat penerima manfaat pembebasan lahan program pembangunan Waduk Karian betul-betul merupakan pihak yang berhak mendapatkan ganti untung. Pada pertemuan ini diketahui masyarakat yang seharusnya mendapatkan ganti untung Rp50.000 per meter persegi namun ternyata hanya menerima kisaran Rp10.000-Rp20.000 per meter persegi akibat melepas kepada pihak yang tidak berkompeten.

“Seharusnya masyarakat melepas kepada *stakeholder* terkait program strategis nasional. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan ganti untung. Selain itu berkaitan dengan PMN, Komisi XI bersama Banggar DPR yang memberikan persetujuan untuk PMN, maka kami meminta betul-betul PMN harus tepat guna untuk masyarakat.



Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI membahas ganti rugi lahan Waduk Karian. Foto: Pantha/mi



Foto bersama tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPK perwakilan Jawa Barat. Foto: Taufan/mv

Komisi XI meminta adanya rapat dengar pendapat lanjutan serta audit terhadap LMAN dan Kemenkeu dalam pemanfaatan PMN ini dan bagaimana sebenarnya hasil proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Eriko.

Seperti diketahui, kunjungan Komisi XI dalam rangka melihat lebih dekat pelaksanaan tugas LMAN dalam pembebasan tanah pada pembangunan Waduk Karian yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. Pembangunan waduk menggunakan APBN sebesar Rp1,07 triliun.

DAK MASIH BANYAK MASALAH

Di Bandung, Jawa Barat, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersinergi dan melakukan kerja sama dengan DPR RI dalam mengidentifikasi permasalahan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ditemukan banyak sekali seperti penerima hibah yang belum melapor, masih ada kabupaten/kota yang pengadaan barangnya tidak sesuai aturan. Seperti yang kita tahu, fungsi anggaran itu kan ada di DPR, kemudian fungsi pengawasan juga ada di DPR, baru kemudian fungsi audit ada di BPK. Sudah jelas BPK bertanggung jawab kepada DPR,” sebut Agun saat mengikuti Tim Kunspek Komisi XI DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Awal Oktober lalu.

Pengalokasian DAK tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu penganggaran DAK fisik juga berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas, serta hasilnya

berisiko tidak dimanfaatkan, karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

“Ternyata di provinsi dan kabupaten/kota banyak sekali temuan-temuan yang tidak diketahui oleh wakil rakyatnya. Janganpun di DPRD Provinsi atau Kabupaten, di DPR RI saja tidak diketahui. Jadi harus ada sebuah mekanisme yang lebih bagus, bagaimana fungsi pengawasan Parlemen dengan fungsi audit BPK bersinergi sehingga wakil rakyat itu bisa mengecek transfer ke daerah itu hingga ke kabupaten/kota,” tegas Agun.

Lebih lanjut Agun mengapresiasi kinerja BPK Jabar yang telah mampu menyajikan data-data yang baik dan benar. “Kita apresiasi data-data yang disajikan sudah bagus tinggal bagaimana diimplementasikan saja makanya itu saya bilang harus saling bersinergi dengan DPR RI,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut. • tn,pun/es

Perwira TNI dan Polri jadi Pj Kepala Daerah Jadi Sorotan Publik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tak digelar hingga tahun 2024, membuat pemerintah pusat harus menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah untuk memimpin 271 daerah yang mengalami kekosongan pimpinan daerah mulai dari tahun depan.

Polemik terkait penjabat kepala daerah hingga 2024, muncul ketika Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan menyampaikan pemerintah tidak menutup opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Pj kepala daerah.

Sorotan publik pun mengalir deras menanggapi wacana pemerintah yang membuka opsi TNI-Polri menjadi Pj untuk mengisi kekosongan kursi 271 kepala daerah mulai dari 202. Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan tidak ada regulasi yang melarang TNI/Polri untuk menjadi Pj kepala daerah.

“Memang tidak melanggar peraturan perundangan munculnya TNI dan Polri untuk mengisi komposisi jabatan-jabatan itu,” kata Doli, baru-baru ini. Menurut Doli, ada beberapa hal yang mungkin mendasari mengapa wacana itu muncul. Salah satunya, menurut dia, tidak cukupnya sumber daya manusia (SDM) Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi posisi tersebut.

Setidaknya, pada tahun 2022, akan ada 101 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan habis masa tugasnya. Dan pada tahun berikutnya, ada 170 kepala daerah yang juga habis masa baktinya. Artinya, ada 271 daerah yang akan mengalami

kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerah telah habis pada 2022 atau 2023, sementara Pilkada baru akan digelar serentak pada 2024.

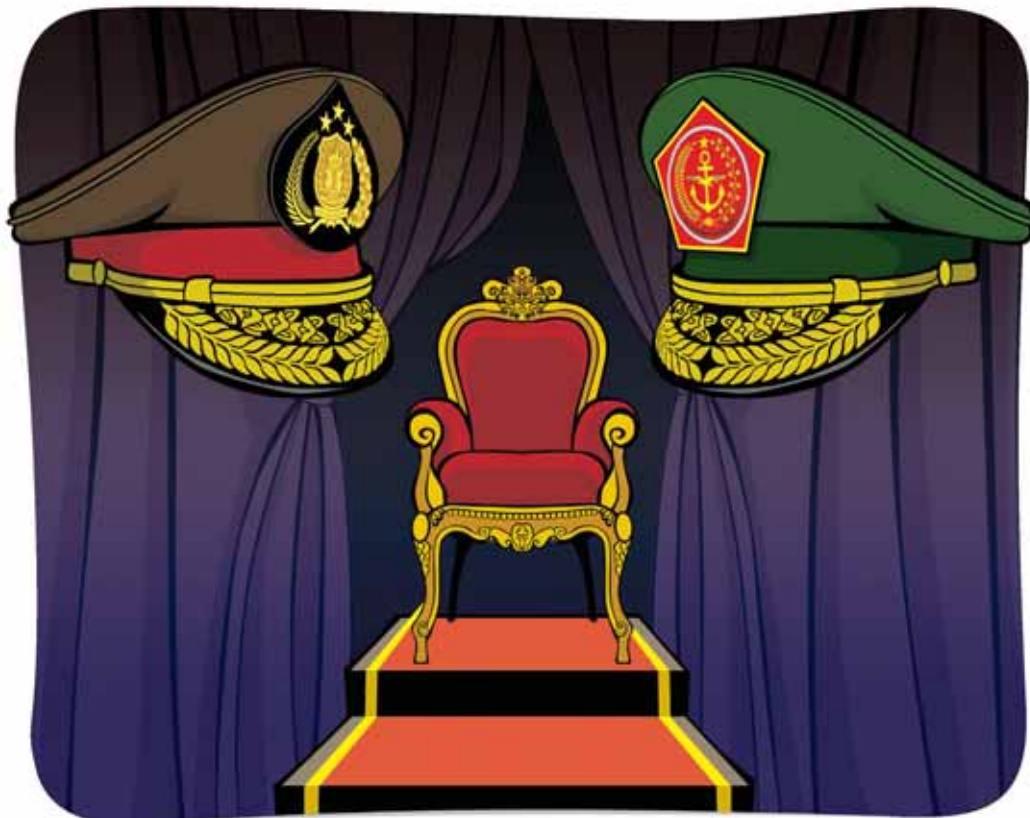
Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah

hasil Pilkada serentak 2024. Doli menilai siapapun yang duduk dalam posisi Pj nantinya harus menjaga netralitas dan independensi. Sebab, jelang tahun Pemilu, tensi politik relatif tinggi lantaran semua pihak berusaha untuk menang.

“Oleh karena itu, kita berharap siapapun itu nanti apakah *background*-nya ASN, TNI, Polri kita berharap seperti dia independen dan netral,” kata Doli.

Kendati demikian, Doli meminta pemerintah tetap berhati-hati dalam menunjuk Pj kepala daerah. Sebab, Pj kepala daerah yang tak netral akan berimplikasi pada kualitas pemilu mendatang dan bisa saja berpihak pada golongan atau kekuatan politik tertentu.

“Orang-orang yang ditempatkan itu harus benar-benar yang netral, tidak berpihak kepada siapapun nanti yang ikut dalam kontestasi politik. Karena itu, juga berbahaya misalnya yang ditempatkan posisinya tidak netral kemudian berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu,” tutup politisi Partai Golkar ini.



“ORANG-ORANG YANG DITEMPATKAN ITU HARUS BENAR-BENAR YANG NETRAL, TIDAK BERPIHAK KEPADA SIAPAPUN NANTI YANG IKUT DALAM KONTESTASI POLITIK. KARENA ITU, JUGA BERBAHAYA MISALNYA YANG DITEMPATKAN POSISINYA TIDAK NETRAL KEMUDIAN BERPIHAK PADA SUATU KEKUATAN POLITIK TERTENTU”

Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Oji/mvl



PERLU KAJIAN MENDALAM

Berbeda pandangan, Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menyarankan agar pemerintah mengkaji secara mendalam opsi menjadikan anggota TNI-Polri. Sebab dikhawatirkan terjadi potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ia pun menyarankan agar perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.

“Opsinya penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri yang aktif harus dikaji secara mendalam. Jangan TNI/Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas Kepala Daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir,” ujar Guspari.

Menurutnya, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 mengatakan bahwa pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berasal dari ASN. Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat

dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kekosongan 271 kursi kepala daerah pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri juga pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Di antaranya di wilayah Jawa Barat dan Aceh.

Untuk itu, lanjut Guspari, pemerintah dalam hal ini Kemendagri perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini. Sebab, bagaimana pun pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.

Dalam kesempatan berbeda, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi berpendapat Pj kepala daerah yang berasal dari TNI

atau Polri dapat dipertimbangkan berdasarkan situasi daerah. “Kalau keadaan daerah rawan konflik karena peristiwa politik dan ketidakstabilan keamanan, saya pikir tidak apa Pemerintah menunjuk TNI atau Polri untuk menjadi Pj kepala daerah tersebut,” kata Asrinaldi dikutip dari *antaranews.com*.

Ia menilai penguasaan isu-isu keamanan wilayah oleh TNI dan Polri melatarbelakangi kesesuaian mereka untuk menjabat sebagai Pj kepala daerah di wilayah yang rawan konflik. Akan tetapi, dia menambahkan, untuk daerah dengan kondisi politik yang cenderung stabil, dan memiliki pengawasan keamanan yang berjalan dengan baik, maka posisi kepala daerah sebaiknya diserahkan kepada pejabat birokrasi dari sipil yang memahami cara memimpin masyarakat dalam kondisi normal. ● *ann/sf*

“JANGAN TNI/POLRI DISERET UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH. KARENA ITU JABATAN POLITIS, BUKAN JABATAN KARIR”

Anggota Komisi II DPR RI
Guspari Gaus. Foto: Jaka/mvl



THE 1st GLOBAL PARLIAMENTARY MEETING ON ACHIEVING THE SDGs



Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani bersama pimpinan BKSAP DPR RI. Foto: Enolw

Upaya DPR Akhiri Pandemi melalui Rencana Global SDGs di Forum IPU

Pandemi Covid-19 melahirkan banyak krisis kemanusiaan di banyak aspek. Tercatat, 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan akibat pandemi nan berkepanjangan, terhitung sejak awal Maret 2020. Krisis kemanusiaan ini menyebabkan seluruh negara di dunia pada gilirannya menghadapi tantangan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga sosial.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah penyempurnaan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang dirancang untuk dilanjutkan hingga tahun 2030. SDGs merupakan

agenda pembangunan dunia yang telah diputuskan dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Dimana, secara garis besar adalah dalam rangka untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan pembangunan yang inklusif serta kualitas kehidupan

dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Mewujudkan misi ini, DPR membutuhkan kerja sama seluruh *stakeholders*, melalui fungsinya sehingga memastikan seluruh agenda pembangunan dapat terfokus pada 5P, yaitu *People* (Manusia), *Planet* (Bumi), *Prosperity* (Kemakmuran), *Peace* (Perdamaian), dan *Partnership* (Kemitraan).

Karena itu, pada 28-30 September 2021, DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi tuan rumah *The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs* yang bertajuk 'Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs', di Jakarta, Kamis (30/9/2021)

yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) secara fisik dan virtual.

179 delegasi parlemen IPU dari beberapa negara dan pemimpin organisasi dunia turut hadir dalam agenda ini. Di antaranya, Fernand de Varenes (United Nations Special Rapporteur on minority issues), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur Jenderal World Health Organization), Maisa Rojas (Director of the Center for Climate and Resilience Research Chile dan Lead Author of the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC).

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjelaskan, kerja sama di tingkat global ini akan mendorong pengarusutamaan SDGs ke dalam berbagai proses legislasi di tingkat nasional dan memperkuat kerjasama yang telah terbangun di tingkat global untuk bersama-sama mewujudkan target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bahkan, menurut Gobel, Forum SDGs ini akan menjadi momentum untuk mempercepat pencegahan, penanganan dan mengakhiri pandemi Covid-19. Dimana, pandemi Covid-19 semakin menyadarkan masyarakat dunia bahwa keseimbangan ekologis harus semakin dijaga.

“Munculnya Covid-19 ini merupakan bentuk evolusi makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Akses terhadap vaksin dan obat-obatan perlu ada kesetaraan. Ilmu kedokteran, farmasi, dan mikrobiologi harus dibagikan bersama. Jangan dimonopoli oleh negara-negara tertentu saja,” ujar Gobel dalam pertemuan tersebut.

Dalam upaya keras untuk mengakhiri pandemi inilah, beberapa rencana global perlu dihadirkan antar-parlemen dari beberapa negara IPU. Pertama, rencana global perlu mendorong percepatan pemulihan atau mengakhiri pandemi (Global Plan to End the Pandemic) termasuk *global vaccination roadmap*.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani turut menilai, rencana global tersebut

“MUNCULNYA COVID-19 INI MERUPAKAN BENTUK EVOLUSI MAKHLUK HIDUP UNTUK BERADAPTASI DENGAN LINGKUNGAN YANG BARU...”

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Andri/nvl



dibutuhkan karena berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia sebesar 73 persen di antaranya hanya pada 10 negara. Bahkan, capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil yakni kurang dari 2 persen.

“Namun sebetulnya jika 5,7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7,8 miliar penduduk dunia, maka 36 persen penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga, *roadmap* ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” jelas Puan saat membuka acara.

Kedua, peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, teknologi transfer dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin. Ketiga, perlunya masyarakat internasional melakukan koordinasi kebijakan ekonomi saat pemulihan ekonomi global.

Keempat, masyarakat internasional juga dinilai perlu berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender. “Negara maju harus membantu negara miskin dalam pencapaian SDGs,” tukas Menko PMK periode 2014-2019 ini.

Selain penanganan pandemi Covid-19, forum IPU ini juga mengangkat isu krusial bagi pencapaian SDGs seperti Covid-19, perubahan iklim, kesehatan, ketimpangan, transformasi ekonomi dan energi serta pendanaan SDGs.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam mengkampanyekan peran parlemen dalam pencapaian SDGs ini di berbagai forum tidak hanya pada IPU General Assembly ini saja, tapi juga pada forum antar-parlemen dunia lainnya. Seperti, *G20 Parliamentary Speakers Summit*, *World Conference of Speakers of Parliament*, *AIPA General Assembly*, dan berbagai forum multilateral lainnya.

Bahkan di tahun 2017, DPR RI juga berhasil menginisiasi forum parlemen dunia pertama yang membahas SDGs dan menghasilkan *Bali Declaration* yang berisi serangkaian komitmen parlemen dalam memastikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Selain itu, beberapa waktu lalu, DPR RI juga baru saja meluncurkan Portal SDGs DPR RI, yaitu platform digital yang menjadi pusat data dan informasi terkait pencapaian SDGs dengan menekankan pada fungsi parlemen yaitu penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan. Platform digital tersebut dapat diakses melalui kanal <https://sdgs.dpr.go.id/> yang di-*update* secara berkala. ● rdn/es



**DAERAH
PEMILIHAN
(DAPIL)**



Effendy Sianipar: Serahkan Bantuan Alsintan di Pekanbaru



Anggota DPR RI Effendy Sianipar menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani di Kota Pekanbaru. Foto: Ist/nvl

Bantuan alat dan mesin pertanian kepada para kelompok tani bertujuan menyejahterakan dan meningkatkan kehidupan para petani yang ada di Kota Pekanbaru.

Anggota DPR RI Effendy Sianipar menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk dibagikan kepada kelompok tani.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan alsintan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Pekanbaru Muhammad Firdaus dan perwakilan dari 15 kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, bantuan kepada Distankan Kota Pekanbaru diantaranya 1 unit traktor roda empat, 1 unit kultivator, 1 unit roda dua singkal, 5 unit traktor roda dua rotari, 4 unit pompa air dan 2 unit *hand sprayer* elektrik. Effendy berharap, melalui bantuan alsintan, dapat mensejahterakan sektor

pertanian dan peternakan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tak hanya itu, sambung Effendy, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong agar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sehingga, melalui bantuan alsintan tersebut dapat menumbuhkan minat generasi muda milenial Indonesia untuk dapat menekuni profesi petani.

Effendy menyampaikan, masyarakat terutama generasi muda agar tidak malu untuk berprofesi menjadi seorang petani. "Jadi petani ini sekarang harus lebih modern, dengan bantuan ini semoga dapat mempermudah kerja petani dan hasil yang dihasilkan itu semakin hari semakin lebih baik," pungkas Legislator dapil Riau I itu.

Sementara itu, Plt Kadistankan Muhammad Firdaus mengapresiasi bantuan yang telah diberikan Anggota DPR RI Effendy Sianipar kepada para petani yang ada di Kota Pekanbaru. "Kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada Anggota DPR RI dapil Riau I Bapak Effendy Sianipar yang setiap tahap, setiap tahun sudah mencurahkan perhatiannya kepada insan pertanian," kata Muhammad Firdaus.

Firdaus juga berpesan kepada para kelompok tani agar segera memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian tersebut. Salah satu warga dari kelompok tani, Ahmad Taufan mengucapkan terimakasih kepada Anggota Komisi DPR RI Effendy Sianipar yang telah memberikan bantuan. "Semoga makin menambah penghasilan yang banyak. Dan semoga bisa jaya ke depan," tutupnya. ● pun/es

Agun Gunandjar Sudarsa: Apresiasi Pemuda Pelopor Pembuat Mesin Perontok Padi

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Agun memborong sebanyak 20 paket mesin perontok padi yang nantinya akan dibagikan kembali kepada 20 kelompok tani.

Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, baru-baru ini mengunjungi pemuda pelopor pembuat mesin perontok padi mini di Desa Baregbeg Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Seusai melihat pekerjaan pembuatan mesin perontok padi, Agun mengatakan, inovasi teknologi yang dilakukan Zuhri ini diharapkan bisa lebih menginspirasi ke pemuda yang lain.

Mesin perontok Padi mini ini dinilai Agun bisa memberi kemudahan pengembangan usaha teknologi tepat guna dalam mengembangkan dan mengaplikasikan yang dapat memberi solusi permasalahan teknologi bagi petani dan masyarakat. “Saya lihat mesin perontok ini ringan dibawa karena memang ukurannya mini dan bisa digendong dan sistem kerjanya pun sangat mudah dan efektif,” ujarnya.

Agun menambahkan, 20 paket yang dibeli nantinya akan diberikan ke kelompok tani. “Kalau seandainya mesin tersebut dalam dua kali panen tidak ada kendala dan masih bagus, maka saya akan kembali membeli lagi sebanyak 20 paket lagi,” ungkapnya.

Agun berharap pemerintah bisa



Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengunjungi *workshop* pembuatan mesin perontok padi mini. Foto: ISI/ntv

memberikan dukungan yang lebih baik terutama dalam pemasaran produktif. Selaku wakil rakyat, dirinya menyatakan akan ikut mengembangkan dengan memasarkan ke berbagai daerah yang lahan pertaniannya cukup potensial.

“Saya doakan semoga Zuhri yang sedang masih menunggu hasil kejuaraan lomba pemuda pelopor di tingkat Nasional bisa menjadi juara, sehingga bisa lebih menginspirasi pemuda-pemuda yang lainnya untuk bisa terus berinovasi,” tutur Agun.

Sementara itu, Samsul Zuhri, pencipta mesin perontok padi mengucapkan terima kasih pada Agun selaku wakil rakyat yang telah berkenan berkunjung ke Lakkok untuk melihat langsung

inovasi dari pemuda asal Baregbeg, Lakkok, Kabupaten Ciamis. Zuhri mengatakan, mesin perontok padi mini ini bisa membantu pekerjaan petani dalam proses pengolahan hasil pertanian pasca panen.

“Semoga apa yang telah saya lakukan kedepannya dapat memotivasi lahirnya pemuda yang kreatif, peduli dengan lingkungan sekitar dan mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial,” ucapnya.

Zuhri juga tidak lupa meminta doanya kepada masyarakat Ciamis agar dapat lolos sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. “Semoga bisa keluar menjadi juara dan membawa harum nama Kabupaten Ciamis,” harap Zuhri. ● es

Raden Wulansari/Mulan Jameela: Dari Rumah ke-Rumah, Dengarkan Aspirasi

Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan untuk mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat secara langsung. Utamanya masyarakat konstituen yang diwakilinya.

Adalah Anggota DPR RI Raden Wulansari atau yang akrab dipanggil Mulan Jameela, ketika memasuki masa reses, Mulan dengan aktif mendengar secara langsung aspirasi masyarakat dengan datang dari rumah ke rumah warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Masyarakat itu perlu didengar

secara langsung. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan tugas saya sebagai Anggota DPR RI dapil Jawa Barat XI,” ujar politisi fraksi partai Gerindra ini.

Pada kesempatan tersebut, aspirasi yang disampaikan masyarakat di antaranya mengenai keinginan masyarakat agar kegiatan perekonomian dan perdagangan bisa berjalan kembali normal. Sebab,

selama pandemi, banyak usaha masyarakat yang gulung tikar.

“Masyarakat juga mengharapkan lowongan pekerjaan dampak dari PHK di beberapa perusahaan,” tambahnya.

Selama di Kabupaten Garut, Mulan berkeliling dari satu desa ke desa yang lain di Kecamatan Selaawi dan Kecamatan Malangbong. Selain itu, Mulan juga melihat kondisi sarana prasarana ibadah seperti Mushola yang ada di desa tersebut dan memberikan bantuan perlengkapan ibadah seperti Al Quran, karpet mushola, sarung dan mukenah.

“Saya juga mengajak warga sekitar dan tokoh masyarakat untuk membantu fasilitas-fasilitas umum seperti contohnya Mushola, karena pemenuhan fasilitas umum yang layak dan baik seperti Mushola juga menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Mulan juga memberikan bantuan seperti sembako kepada warga yang didatangi langsung dari rumah ke rumah. “Saya sangat bersyukur dengan tugas dan kewajiban yang saya jalankan saat

ini, untuk dapat membantu dan membangun daerah pemilihan di Jawa Barat XI, khususnya di Kab.Garut,” imbuh Mulan.

Mulan berharap, dengan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan memberikan bantuan kepada warga, dapat membantu warga sekitar khususnya yang terkena dampak pandemi Covid-19. Baik yang ter-PHK, pedagang yang kurang laku dan lain sebagainya.

“Serta dapat memacu semangat gotong royong dan solidaritas warga sekitar untuk bersama-sama ikut memperhatikan sarana dan prasarana umum seperti Mushola sebagai tempat ibadah Bersama,” tutupnya.

● bia/es



Anggota DPR RI Raden Wulansari/Mulan Jameela saat memberikan bantuan kepada warga di dapilnya. Foto: lsl/nvl

Aminurokhman: Bantu Masyarakat Bangkit dari Pandemi

Berbagai upaya dilakukan oleh Anggota DPR RI dalam rangka menghidupkan kembali sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tengah terpuruk akibat terdampak pandemi Covid-19.



Anggota DPR RI Aminurokhman saat membagikan bantuan bibit ikan kepada pengusaha muda di dapilnya. Foto: Ist/nvl

Anggota DPR RI Aminurokhman bergerak membantu masyarakat khususnya di daerah Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur agar segera bangkit untuk mandiri. Dirinya membagikan bantuan 5000 bibit ikan lele, 5000 bibit ikan nila, beserta stimulus pakan. Bantuan

tersebut diberikan kepada pengusaha muda daerah Pasuruan-Probolinggo.

“Saya sengaja memfokuskan pada Kundapil III 2020/2021 ini untuk memberikan bantuan bibit ikan supaya dapat menciptakan pemuda yang bisa ikut andil dalam mewujudkan ekonomi mandiri,” jelas Amin.

Pembagian bibit ikan itu dilakukan

pada enam lokasi sekitar Kota dan Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Manikrejo, Dusun Bitingan, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul, Desa Tebas, dan Desa Bandaran. Ia menekankan hal ini perlu dilakukan agar generasi muda terlibat aktif dalam menyerap dan memanfaatkan potensi daerah, sekaligus mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri serta berkesinambungan.

Tidak berhenti pada pembagian bibit ikan saja, politisi Fraksi NasDem itu turut memberikan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara berkala. Ia menerangkan ada 30 RTLH yang menerima bantuan tersebut di sekitar Kota Pasuruan. Kehadiran RTLH ini demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ia turut menyalurkan 1200 paket sembako di empat kecamatan Kota Pasuruan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan serta kelompok UMKM yang terdampak selama PPKM Darurat. Disalurkan melalui Kader Partai NasDem DPC Kota Pasuruan dengan mendatangi dari pintu ke pintu rumah masyarakat, menurut Amin, skema ini dianggap efektif dan efisien guna meminimalisir penyebaran Covid-19.

Ia pun berpesan agar segenap masyarakat berpartisipasi untuk turut menyelesaikan vaksinasi Covid-19. Keterlibatan aktif menjadi tindak krusial untuk menciptakan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

“Saya berharap seluruh masyarakat terus menerapkan prokes, dan ikut menyelesaikan vaksinasi Covid-19 karena itu demi kepentingan bersama,” tandas Wakil Rakyat Dapil Jawa Timur II itu. • ts/es



Anggota DPR RI Sofyan Ali meninjau realisasi program bedah rumah atau kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di dapilnya. Foto: Ist/tni

Sofyan Ali: Tinjau Program Bedah Rumah

“InsyaAllah saya akan konsen, ke depan program seperti ini akan terus digulirkan, karena saya lihat ini sangat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat”

Anggota DPR RI Sofyan Ali meninjau realisasi program bedah rumah atau kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Lubuk Kambing, Desa Muara Danau dan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh, Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Sofyan juga menyempatkan diri untuk secara langsung berdialog bersama para perangkat desa/

kelurahan, ketua RT serta masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Hal itu dilakukannya sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Suasana akrab penuh nuansa kekeluargaan begitu terasa dalam rangkaian acara dialog tersebut.

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, kegiatan BSPS dan PISEW merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang

mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan. Ia berharap bantuan stimulasi pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Untuk di Kecamatan Renah Mendaluh ini, Program BSPS atau Bedah rumah ini dilaksanakan di 3 Desa Kelurahan, sedangkan untuk kegiatan PISEW ada di Desa Tanah Tumbuh. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi,” sambung Sofyan Ali.

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

“Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” terangya. ● **tn/es**

Muslim: Dukung Ketahanan Pangan Keluarga

“Budidaya tanaman sayur juga dapat dikembangkan menjadi peluang usaha mikro bagi masyarakat di Langsa, Aceh”

Anggota Komisi DPR RI Muslim bekerjasama Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih sayuran kepada 60 Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui program kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Bantuan diberikan kepada Kelompok Wanita Tani Rizki Jaya Muslim Utama, Gampong Paya Bujok Seulemak, Langsa Baroe, Kota Langsa, Aceh. Kegiatan P2L ini juga

dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Dapil Aceh 2 yang meliputi Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, ddalam masa reses Persidangan I TS 2021-2022, baru - baru ini.

Menurut Muslim, program P2L ini merupakan salah satu strategi untuk memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, khususnya di masa pandemi Covid-19. “P2L mampu meningkatkan ketahanan pangan

keluarga dengan mendorong pemanfaatan pekarangan di setiap rumah sebagai sumber pangan keluarga,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan keluarganya. Dijelaskan, ibu-ibu rumah tangga saling berdampingan agar sama-sama memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan pemanfaatan pekarangan di setiap rumah, setiap rumah tangga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus meringankan beban pengeluaran sehari-hari. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, tak sedikit masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.

“Saya harap ibu-ibu dapat memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif untuk diolah dengan baik, sehingga menjadi produktif dan memiliki manfaat menumbuhkan kebutuhan pangan sehari-hari,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, keketahanan dan kelautan. ● ann/es



Anggota DPR RI Muslim saat memberikan bantuan benih sayuran melalui program kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Foto: Ist/mt

Mahfudz Abdurrahman: Serap Aspirasi dari Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM

“Antusiasme peserta dan tokoh ormas yang hadir dalam agenda serap aspirasi memudahkan wakil rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan”



Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat acara jaring aspirasi dari para tokoh ormas Islam dan LSM se-Kota Bekasi. Foto: ist/nw

Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengadakan agenda jaring aspirasi sebagai kewajiban anggota dewan kepada konstituen di daerah pemilihan di Kota Bekasi dan Kota Depok. Acara yang diselenggarakan pada minggu pertengahan oktober lalu, dihadiri para tokoh ormas Islam dan LSM se-Kota Bekasi. Acara yang berlangsung di Griya Wulansari, Margajaya Bekasi Selatan dihadiri kurang lebih 70 tokoh ormas Islam dan LSM di Kota Bekasi.

“Alhamdulillah hari ini, saya berkesempatan bersilaturahmi dalam rangka reses sebagai anggota dewan dengan menerima masukan dan sharing dari tokoh umat Islam, budaya dan UMKM di Kota Bekasi,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.

“Kebetulan saya di Komisi VI salah satu ruang lingkupnya adalah terkait IKM (Industri Kecil Menengah). Sebagai wakil rakyat kewajiban kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam meningkatkan

“BEBERAPA HARI LALU SAYA PUN BERBINCANG DENGAN PELAKU UMKM DI KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KEMENTERIAN. HAL INI TENTUNYA MENJADI FOKUS KAMI DALAM PEMULIHAN PEREKONOMIAN SAAT TREN KASUS COVID 19 MENURUN”

pemberdayaan IKM,” jelasnya.

Mahfudz pun menuturkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian

Investasi serta Kementerian Koperasi dan UMKM melalui komunikasi dirinya terus memberikan pendampingan serta *support* dalam bentuk bantuan kepada pelaku UMKM di Kota Bekasi.

“Beberapa hari lalu saya pun berbincang dengan pelaku UMKM di Kota Bekasi dengan pihak Kementerian. Hal ini tentunya menjadi fokus kami dalam pemulihan perekonomian saat tren kasus Covid 19 menurun,” bebernya.

Beberapa Tokoh Ormas yang hadir merespon positif dengan upaya yang dilakukan oleh Mahfudz Abdurrahman sebagai upaya pemberdayaan UMKM dalam peningkatan perekonomian. “Kami berterima kasih sekali dengan upaya Ustad Mahfudz dengan adanya temu silaturahmi ini. Kami pun makin percaya dan mendukung PKS agar bisa memimpin di Kota Bekasi dalam ajang Pemilu dan Pilkada nanti,” ujar salah satu peserta yang hadir. ● **tn/es**



Anggota DPR RI Muhammad Syafrudin saat memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian. Foto: Ist/nvl

Muhammad Syafrudin: Serahkan Bantuan Alsintan kepada Masyarakat di Sumbawa

Di saat pandemi yang tak pasti kapan akan berhenti, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani akan sangat berarti. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para petani.

Anggota DPR RI H. Muhammad Syafrudin (HMS) menyerahkan bantuan aspirasi tahap kedua 2021 untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Bertempat di aula Distan KSB, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Oktober lalu. HMS menyampaikan, bantuan yang diberikan berupa alat mesin pertanian (alsintan) sudah kesekian kalinya diberikan kepada kelompok tani di Kabupaten Sumbawa Barat.

HMS mengungkapkan, bantuan alsintan merupakan bentuk aspirasi untuk masyarakat Sumbawa Barat.

Adapun bantuan berupa traktor roda dua 3 unit, cultivator 3 unit, *rice transplanter* 1 unit, pompa air 13 unit, power thresher 15 unit, *handsprayer* 8 unit, bibit dan pakan lele 8 kelompok, UPPO 4 paket masing-masing per 200 juta.

“Selain itu Bang Pesona 2 paket masing-masing per 60 juta, KBR 1 paket masing-masing 100 juta, embung 1 paket masing-masing 70 juta, bibit produktif 1000 pohon, Ipal 1 paket masing-masing 200 juta dan bioflok 1 paket,” tandas Politisi Fraksi PAN tersebut.

Lebih lanjut, HMS mengungkapkan bantuan alsintan juga merupakan

bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pertanian agar berjalan dengan baik. Sehingga, dengan demikian HMS mengharapkan kedatangan bantuan alsintan dapat bermanfaat bagi masyarakat petani.

“Bantuan yang saya berikan ini silakan digunakan dan dirawat untuk kepentingan masyarakat tanpa adanya perbedaan dan jangan sampai berpindah Tangan, karena bantuan ini memiliki nilai manfaat dan untuk kemaslahatan umat,” pungkash HMS.

Menutup pernyataannya, legislator dapil Nusa Tenggara Barat 1 ini menambahkan walau dengan kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM sudah level 1, namun pemberian bantuan alsintan di Kabupaten Sumbawa Barat ini tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. ● pun/es



Syamsurizal: Beri Santunan kepada Pondok Pesantren

“Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus terus diberikan dukungan oleh pemerintah daerah maupun semua pihak lainnya. Sebab merekalah yang akan menjadi generasi penerus dalam memimpin dan menjaga daerah ini”

Anggota DPR RI Syamsurizal memberikan santunan dalam kunjungannya ke salah satu pesantren yang ada di ibu kota Bagansiapiapi, Oktober lalu. Pondok pesantren tersebut yakni Rhoudatul Jannah yang berada di Jalan Nelayan, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Dalam kunjungan tersebut, Syamsurizal hadir didampingi sejumlah tokoh lainnya seperti anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi dan Wakil Ketua Bidang Infokom DPW PPP Riau Zulkarnain Kadir. Kedatangan rombongan disambut hangat KH Syukur selaku pengasuh pondok pesantren serta para santri dan santriwati.

“Ini tadi kita berkunjung ke pesantren dan memberikan bantuan,” terang politisi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Syamsurizal melanjutkan, selain memberikan bantuan, kunjungan tersebut bertujuan guna melihat kondisi bangunan pondok pesantren. Dia pun mengaku, kunjungannya ke pondok pesantren tersebut memang masih kurang persiapan dan dalam waktu dekat akan kembali untuk memberikan beberapa bantuan.

“Tadi kita juga melakukan pengecekan kondisi pesantren dan memang ada beberapa pembangunan yang masih terkendala dan perlu diberikan dukungan pemerintah agar lebih nyaman digunakan para santri, “ paparnya.

Syamsurizal pun menilai bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus terus diberikan dukungan oleh pemerintah daerah maupun semua pihak lainnya. “Sebab merekalah yang akan menjadi generasi penerus dalam memimpin dan menjaga daerah ini,” pungkasnya.

● hal/es

“TADI KITA JUGA MELAKUKAN PENGECEKAN KONDISI PESANTREN DAN MEMANG ADA BEBERAPA PEMBANGUNAN YANG MASIH TERKENDALA DAN PERLU DIBERIKAN DUKUNGAN PEMERINTAH AGAR LEBIH NYAMAN DIGUNAKAN PARA SANTRI,”



Anggota DPR RI Syamsurizal saat memberikan santunan di salah satu Pondok Pesantren. Foto: Ist/wh

Pratiwi Noviyanthi

Berjuang Memanusiakan Manusia

“Kalau memikirkan duniawi maka tidak akan ada habisnya. Kita (memikirkan) cari uang tidak ada batasnya, tetapi kalau kita membantu orang, insyaAllah akan berkah”

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbuat baik bagi sesama. Salah satunya seperti yang dilakukan sosok wanita cantik bernama Pratiwi Noviyanthi yang aktif memberikan perhatian kepada para Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dijumpainya di berbagai wilayah di tanah air.

Apa yang dilakukan perempuan kelahiran Bandung 1990 itu memang patut diapresiasi dan didukung secara luas oleh berbagai pihak, karena tak banyak dari kita yang mau secara tulus bersusah payah untuk memberikan perhatian dan bantuan yang memang dibutuhkan oleh ODGJ. Kepedulian nyata mojang geulis yang akrab disapa Teh Novi ini kepada ODGJ menjadi simbol rasa kemanusiaan yang tinggi kepada manusia lainnya yang hidup di bawah alam sadarnya. Tindakan memanusiakan manusia oleh Novi bisa dikatakan langka di zaman serba hebat seperti sekarang ini, dimana hampir semua orang tenggelam sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing.

Setelah delapan tahun berprofesi sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan tanah air, Novi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang disukainya itu. Ia mantap beralih menjadi seorang *Youtuber* dan fokus pada kegiatan sosial yang berkaitan dengan ODGJ.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, ketika banyak orang yang mengalami kesulitan akibat

terdampak dan kehilangan pekerjaan, Novi justru berani mengambil sikap untuk *resign* dari profesi yang telah menghidupinya itu, ia bertekad kuat untuk mengembangkan diri di dunia sosial media.

“Kalau memikirkan duniawi maka tidak akan ada habisnya. Kita (memikirkan) cari uang tidak ada batasnya, tetapi kalau kita membantu orang, insyaAllah akan berkah,” ujar Novi. Keputusannya berhenti dari pramugari juga mendapat dukungan penuh dari keluarga.

Walhasil kini *followers* akun media sosialnya pun semakin bertambah banyak. Sosoknya mulai



Pratiwi Noviyanthi.
Foto: Ist

banyak dikenal orang dan kesibukannya pun menjadi. Lewat kanal *Youtube* miliknya Novi berkiprah mempublikasikan kegiatannya dalam membantu ODGJ dan orang terlantar di berbagai daerah.

“*Channel* ini ditujukan untuk bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Membantu orang membuat saya merasa bahagia dan merasa hidup saya bisa berarti bagi orang lain,” ucapnya.

Awal mula Novi memutuskan untuk fokus membantu ODGJ ketika ia merasa nyaman berinteraksi dengan ODGJ. Interaksi itulah yang mendorong keinginan dalam dirinya untuk terus membantu mereka, para ODGJ. Salah satu tempat penampungan ODGJ di Tasikmalaya bernama Yayasan Mentari Hati Tasikmalaya menjadi tempat pertama kali baginya berinteraksi dengan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan.

Novi mengaku awalnya ada perasaan takut saat membantu menangani ODGJ. “Tetapi *mindset* aku berubah pada saat di Yayasan itu. Di sana, aku benar-benar melihat ODGJ yang sangat menyenangkan untuk aku, bahkan mereka bisa dianggap teman atau saudara bagi kita. ODGJ atau disabilitas mental adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kalau bukan kita yang ngebantu, siapa lagi?” tuturnya.

Cara pendekatan kepada para ODGJ dilakukannya secara perlahan ia juga akan mencari tahu apakah orang tersebut membawa senjata tajam atau tidak, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Informasi biasanya ia terima dari relawan mengenai asal usul dan lain sebagainya.

“Beberapa kali kita pernah kecolongan karena ODGJ nya membawa pisau, gunting, dan benda tajam lainnya,” terangnya.

Ia juga tidak segan-segan untuk mencukur rambut, menyuapi makan, hingga memandikan ODGJ langsung tanpa merasa takut untuk dilukai.

Dirinya merasa puas dan takjub jika melihat ODGJ tampak lebih bersih dan rapi. Menurutnya terapi yang baik untuk ODGJ adalah dengan menggunakan air. Dengan membantu seperti ini, Novi belajar untuk memanusiakan manusia sesungguhnya.

Dari sekian ODGJ yang dibantunya, tak sedikit yang akhirnya dapat kembali sembuh dan bisa menjalankan aktifitas secara normal kembali. Walaupun telah sembuh, Novi tidak merta memutus jalinan komunikasi terhadap yang bersangkutan. Novi



Novi ketika menyapa ODGJ. Foto: ist

berupaya total dalam berbuat, ia tetap memikirkan nasib dan kelangsungan kehidupan ODGJ yang telah dibantunya. Novi berusaha membantu membuatkan usaha agar mereka bisa mandiri serta tidak bergantung pada orang lain.

“Jadi tidak kita lepas begitu saja. Tetapi kalau untuk ODGJ yang masih belum sembuh kita akan membawanya ke rumah sakit jiwa dengan biaya yang ditanggung secara pribadi, yang saya peroleh dari konten *Youtube*,” urainya.

Aksi sosial lain yang pernah dilakukan Novi adalah merenovasi salah satu rumah tempat tinggal ODGJ yang pernah ditanganinya. Kini ia juga mulai fokus kepada soal lansia sebatangara, dan bayi terlantar karena ibunya ODGJ. Ada dua bayi

berjenis kelamin perempuan yang ibunya mengalami gangguan jiwa, yang sekarang ia rawat di rumahnya.

Novi berharap kelak ia bisa memiliki rumah singgah bagi ODGJ, orang terlantar, yatim piatu, dhuafa, dan orang-orang yang membutuhkan tanpa harus memandang suku, ras, dan agamanya. Sesuai dengan misi hidupnya, ia ingin menjadi orang yang bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. “Ketika kalian mampu melakukan sesuatu, maka lakukanlah yang terbaik,” imbau Novi.

Pesan moral yang bisa diresapi dari sebuah perbuatan baik kepada sesama makhluk adalah berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hilangkan rasa ragu dalam dirimu dalam menebar kebaikan, sebab Allah telah menjamin balasan berupa kebaikan juga bagi yang melakukannya. Dan Allah senantiasa melimpahkan rahmat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan yang diperbuatnya itu akan kembali pada diri orang yang melakukannya. Jika kamu berbuat baik maka sesungguhnya kamu telah melakukan kebaikan bagi dirimu sendiri. Jangan biarkan orang yang datang kepadamu kecuali ia merasa lebih baik dan bahagia. ● dep/es

Magang di Rumah Rakyat, Mahasiswa Harus Belajar dan Berkembang

Merdeka Belajar merupakan sebuah program belajar bagi para mahasiswa di luar kampus melalui kegiatan magang dan studi independen bersertifikat. Merdeka Belajar diatur dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang tujuannya untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021 ini, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai lembaga legislatif, membuka kesempatan Merdeka Belajar bagi mahasiswa yang ingin magang dan mengetahui secara langsung bagaimana DPR RI melakukan kerja-kerja konstitusionalnya melalui program bertajuk 'Magang di Rumah Rakyat'.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, antusias mahasiswa dalam memanfaatkan program kampus merdeka untuk mengembangkan diri patut diapresiasi.

"Persaingan yang tidak kalah sengit dari tes masuk CPNS, susah sekali, mengingat jumlah pendaftar yang mencapai hampir 17 ribu orang yang pendaftar," tutur Indra kepada **Parlementaria**, baru-baru ini.

Menurutnya, program 'Magang di Rumah Rakyat' merupakan sebuah kesempatan yang bagus bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri. Sebab, di DPR RI mulai dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I hingga Komisi XI melingkupi seluruh permasalahan kehidupan di Indonesia.

"Program Magang di Rumah Rakyat tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman bagi para mahasiswa untuk turut merasakan atmosfer kerja di DPR dan Setjen DPR. Di sini mahasiswa tidak hanya melihat ruang-ruang rapat DPR, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna," ujarnya saat menemui peserta program 'Magang di Rumah Rakyat'.

Peserta program magang di DPR RI, tambah Indra, akan didampingi mentor-mentor yang profesional dan andal, sehingga diharapkan mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang tugas dan fungsi DPR RI serta peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada Dewan.

"Jika sebelumnya (mahasiswa) melakukan aksi parlemen jalanan, maka dari sini adik-adik bisa langsung



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng didampingi Mendikbud Nadiem Makarim serta jajaran pejabat Kesetjenan DPR RI foto bersama dengan peserta magang di Rumah Rakyat. Foto: Mentari/vml

melihat bagaimana parlemen bekerja bahkan bertanya dan berdiskusi dengan Anggota-Anggota Dewan yang selama ini adik-adik lihat di layar televisi,” imbuh Indra.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga menemui peserta program ‘Magang di Rumah Rakyat’ bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, mengatakan program magang tersebut merupakan tahapan bagi mahasiswa untuk dapat belajar *‘how to live together’*.

Menurutnya, kesempatan magang di rumah rakyat ini merupakan kesempatan yang baik untuk melihat secara langsung kerja-kerja legislatif yang dilakukan DPR RI. “Kuliah itu adalah tahapan untuk belajar *how to live together* kan, mereka *how to know* sudah selesai, *how to do* sudah selesai, sekarang ketika kuliah *how to live together*, bagaimana mereka yang mahasiswa ekonomi, melihat keputusan-keputusan DPR yang berkaitan dengan ekonomi implementasinya kayak apa,” ujarnya.

Agustin menambahkan, dengan magang di DPR RI, mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat melihat secara langsung bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah bersama DPR RI serta bagaimana DPR RI bekerja dalam menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Mereka hanya melihat semuanya dari berita dari medsos dari cerita mulut ke mulut, sekarang mereka ada di sini, kata mas menteri mereka berenang di samudera yang luas secara otomatis mereka akan menemukan sendiri, lalu akan baik jika mereka menemukan teladan,” tambah politisi fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Agustina menilai, DPR RI merupakan wadah tempat belajar yang istimewa. Sebab, dengan belajar di DPR, mahasiswa program magang kampus merdeka dapat belajar sambil mempraktekkannya atau dengan metode *learning by doing*.

PROGRAM ‘MAGANG DI RUMAH RAKYAT’ TIDAK HANYA MEMBERIKAN PENGETAHUAN, TETAPI JUGA PENGALAMAN BAGI PARA MAHASISWA UNTUK TURUT MERASAKAN ATMOSFER KERJA DI DPR DAN SETJEN DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Mentari/nvl



“DPR itu nggak ada sekolahnya, sebagai Setjen nggak ada sekolahnya, sebagai anggota DPR nggak ada sekolahnya, sebagai tenaga ahli juga nggak ada sekolahnya karena disini sulit, kolaborasi, integrasi, waktu, emosi semuanya serba cepet banget,” urainya.

Ke depan, legislator dapil Jawa Tengah IV ini berharap peserta program magang kampus merdeka di rumah rakyat dapat berhasil dalam belajar, mampu mengendalikan diri, dan mulai bisa melihat teladan-teladan dengan mendengar, dan melihat sendiri kebenaran secara langsung.

“Mengendalikan suatu yang meledak-ledak untuk bisa mulai melihat teladan-teladan kolaborasi, teladan-teladan negosiasi, teladan-teladan mendengarkan, teladan-teladan bersabar, teladan untuk mencari sendiri sebuah kebenaran dengan cara meneliti semua hal, tidak hanya dengan mendengar atau bertanya lalu percaya,”

tukas Agustina.

Ditemui di tempat yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim berharap mahasiswa-mahasiswi peserta ‘Magang di Rumah Rakyat’ dapat mempelajari secara langsung bagaimana pemimpin-pemimpin legislatif dalam mengerjakan kerja-kerja konstitusionalnya.

“Ini luar biasa, jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan atau industri, tapi juga cabang-cabang pemerintahan bisa bergabung menjadi mini-mini universitas untuk mengajarkan berbagai skill,” papar Nadiem.

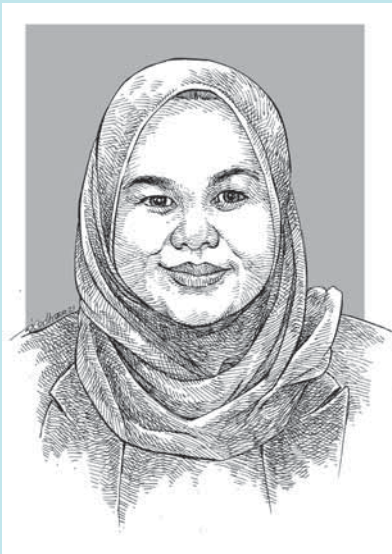
Program magang yang akan berlangsung sejak 6 September 2021 hingga 23 Desember 2021 tersebut, menurut Nadiem merupakan kesempatan yang luar biasa, terlebih melihat antusiasme peserta magang yang sangat kompetitif dalam mengikuti serangkaian tes masuk.

Pasalnya, dari sebanyak 17 ribu pelamar program ‘Magang di Rumah Rakyat’, hanya dipilih 200 mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut. Meski karena satu dan lain hal, peserta yang dapat mengikuti program magang di DPR RI hanya sekitar 191 peserta yang terbagi menjadi 36 mahasiswa pada program Satu Data dan 155 mahasiswa program *Parliament Trainee*.

“Kelihatan banget semangat mereka yang luar biasa mengikuti program ini, sangat kompetitif dan saya ingin memastikan bahwa semuanya itu bisa mendapatkan 20 SKS, itu adalah kebijakan kita,” tambahnya.

Dalam program Satu Data, mahasiswa akan melakukan kajian analisis untuk perancangan sistem terintegrasi satu data DPR RI berdasarkan proses bisnis dan aplikasi-aplikasi sistem bisnis yang ada sebagai acuan pengembangan sistem satu data di DPR RI.

Sedangkan pada program *Parliament Trainee*, selama satu semester, mahasiswa akan mengikuti proses dan segala macam aktivitas dalam mekanisme penyusunan undang-undang, menjalani secara langsung dalam unit-unit yang ada dipandu oleh pendamping internal yang ada. ● bia/es



Oleh: dr. Fatia Maulida
(General Practitioner di Zam-zam
Medical Center Jakarta)

Pandemi Membaik, Siapkah Kita Berdamai dengan Long Covid?

masih meninggalkan gejala sisa bagi penyintasnya.

Setelah berjuang melewati ancaman maut, tidak membuat penyintas bisa bernafas lega. Sejak pertengahan tahun lalu timbul masalah baru yaitu Gejala COVID-19 yang berkepanjangan yang sering disebut dengan *Long Covid-19* atau kondisi pasca COVID-19.

Kondisi pasca COVID-19 atau *Long Covid-19* menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan serangkaian gejala yang dirasakan oleh penyintas COVID-19, yang bahkan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, biasanya timbul 3 bulan setelah terdiagnosis COVID-19 dan bertahan hingga 2 bulan lamanya.

COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi seluruh negara yang terkena, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi baik fisik serta mental kita sebagai manusia yang produktif, keadaan memaksa kita untuk tetap berdiam diri di rumah, menjaga jarak dengan orang terkasih dan merubah kebiasaan hidup kita untuk beradaptasi dengan 'New Normal'.

Setelah melewati masa-masa sulit melewati pandemi yang kian memburuk, akhirnya secercah harapan mulai berdatangan dari munculnya Vaksin hingga "Obat" yang mulai diteliti bisa menurunkan angka kesakitan COVID-19 serta kasus rawat inap. Tetapi bak luka gores, COVID -19

Bahkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) juga menambahkan gejala yang sering dialami seperti:

- Kesulitan bernafas/ nafas terasa pendek;
- Kelelahan;
- Gejala yang memberat setelah aktifitas fisik maupun mental;
- Kesulitan berfikir atau Berkonsentrasi;
- Batuk;
- Nyeri dada atau Sakit perut;
- Sakit kepala;
- Rambut rontok;
- Dada Berdebar;
- Nyeri Sendi atau Otot;
- Nyeri seperti ditusuk jarum;
- Diare;
- Gangguan Tidur;
- Demam;
- Kepala terasa ringan saat berdiri;
- Ruam atau kemerahan di kulit;
- Perubahan suasana perasaan;
- Perubahan Penciuman atau Pengecap;
- Perubahan Periode Menstruasi

Tiga gejala yang paling umum dialami oleh penyintas adalah Fatigue atau kelelahan, kesulitan bernafas, dan gangguan kognitif.

KERUSAKAN ORGAN YANG DIAKIBATKAN COVID-19

COVID-19 ternyata tidak hanya menyerang organ paru pada manusia. Seperti dikutip dari Mayoclinic, ada tiga organ utama yang dirusak virus ini, yaitu jantung, paru dan otak. Bahkan pada orang dewasa dan anak-anak juga mengalami infeksi di berbagai organ setelah mereka terkena COVID-19. Hal ini lah yang mengakibatkan beberapa gejala timbul akibat letak organ yang terkena. Pada kondisi ini, sebagian organ dan jaringan mungkin saja terinfeksi parah.

Kemampuan virus COVID-19 untuk membuat sel darah merah menjadi lebih mudah untuk menggumpal, dan gumpalan yang besar dalam pembuluh darah dapat mengakibatkan berbagai kegagalan fungsi organ. Jika gumpalan tersebut menyerang jantung, maka akan terjadi serangan jantung. Sementara jika menyumbat otak, akan terjadi stroke yang diakibatkan oleh COVID-19, serta berbagai organ lainnya yang turut terdampak.

Kondisi tersebut tentu akan menurunkan kualitas hidup seseorang dan bahkan bisa mengakibatkan kecacatan jika terkena pada organ yang vital. Orang dengan gejala sedang sampai berat tentu mengalami kesulitan, belum lagi berbagai masalah yang ditimbulkan akibat pandemi, termasuk kesehatan mental akibat isolasi mandiri yang terlalu lama, kondisi ekonomi yang sulit, hingga keterbatasan akses kesehatan di negeri ini untuk menghadapi pandemi.

Baru seakan bernafas lega karena turunnya angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kini kita dihadapkan dengan masalah baru yang timbul setelah pandemi, yakni kondisi pasca COVID-19, di mana keadaan yang membuat penyintas mengalami



sumber gambar : freepik.com

penurunan fungsi di berbagai organ hingga turunnya kualitas hidup kita sebagai manusia. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa kembali berdamai dengan keadaan ini, berikut beberapa cara agar kita dapat mengatasi permasalahan yang ada.

PENCEGAHAN SERTA PENANGANAN LONG COVID-19

Hal terbaik untuk mencegah terjadinya Long COVID-19 adalah menjaga diri agar tidak terkena virus COVID-19, salah satunya adalah dengan Vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kini menerapkan aturan baru mengenai vaksinasi bagi penyintas COVID-19 hal ini tertuang dalam Surat Edaran HK.02.02/I/2524/2021 tentang vaksinasi bagi penyintas, yakni penyintas COVID-19 dengan derajat keparahan sakit ringan hingga sedang bisa mendapatkan vaksin dengan jarak waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh, sedangkan untuk penyintas dengan tingkat keparahan Sakit berat bisa mendapatkan vaksin dengan jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh.

Untuk jenis vaksin pun tidak ditentukan harus dengan vaksin tertentu, melainkan dengan jenis vaksin yang tersedia di pelayanan kesehatan.

Bahkan penelitian terbaru dari American Medical Association menyebutkan, vaksin dapat meningkatkan kemungkinan pulih sepenuhnya 2 kali lebih banyak pada penderita Long COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi.

Untuk mengatasi Long COVID-19 selain disarankan untuk vaksinasi, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta meningkatkan imunitas tubuh seperti mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, mengonsumsi vitamin jika perlu, serta berolahraga.

Namun jika gejala Long COVID-19 mengharuskan diri untuk istirahat, maka kurangi kegiatan/aktivitas fisik untuk sementara waktu. Dan jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter atau ke rumah sakit jika terjadi gejala sedang hingga berat, agar masalah bisa cepat tertangani dan bisa kembali sehat sepenuhnya.

Tetaplah sehat, semangat, serta tetap sadar di luar sana kita masih dihadapkan dengan musuh bernama pandemic. Jangan malu untuk meminta pertolongan ketika membutuhkan, agar kualitas hidup kita tetap baik. Jangan lalai, mulailah dari menjaga diri sendiri, keluarga, karena dari lingkup terkecil ini kita bisa keluar dari ancaman pandemi ini. Bersama kita bisa kembali berdamai dengan *New Normal*. ●

Pulau Manusiram



**JEJAK MISIONARIS
DI TANAH PAPUA**

Di Pulau Mansinam ini, 166 tahun lalu atau tepatnya 5 Februari 1855 merupakan awal pendaratan Injil di Tanah Papua oleh dua orang misionaris Jerman Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gottlob Geisler setelah melakukan ekspedisi pelayaran dan singgah di Batavia, Makasar, dan Ternate.

Pulau Mansinam, merupakan salah satu lokasi wisata rohani yang wajib dikunjungi oleh umat Kristiani ketika sedang berada di Manokwari, Papua Barat.

Pulau Mansinam berada di Teluk Doreh yang berada di bagian selatan kota Manokwari, ibu kota Papua Barat. Untuk menuju ke pulau tersebut, kita bisa menggunakan perahu kayu bermotor dengan muatan sekitar 10-12 orang dari Pelabuhan Manokwari dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menit.

Ketika sampai di Pulau Mansinam, kita langsung mendapati tempat pendaratan pertama misionaris (Ottow dan Geisler). Di lokasi tersebut terdapat sebuah Prasasti Salib besar dengan tinggi kurang lebih 6 meter.

Di belakangnya terdapat relief gambar-gambar yang menceritakan soal kedatangan mereka yang disambut oleh warga setempat. Ada juga empat patung perunggu keduanya yang masing-masing menghadap ke laut dan ke arah Salib.

Tak jauh dari pelabuhan, terdapat Gereja Tua Lahai Roi yang saat ini dijadikan tempat warga setempat untuk beribadah. Di belakang gereja, ada sumur tua yang saat itu digali oleh Ottow dan Geisler dibantu warga sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sembari menyusuri jalan menuju Patung Yesus Kristus, kita dapat melihat



Beberapa objek wisata religi di Pulau Mansinam. Foto: Erman/rvi

Gereja Katolik yang dibangun untuk memperingati peradaban Papua di masa lampau.

Tepat di atas bukit, atau tak kurang 1 km dari bibir pantai, berdiri kokoh Patung Yesus Kristus setinggi 35 meter. Patung ini sebagai simbol di mana Kitab Injil pertama masuk ke Tanah Papua.

Patung ini adalah sebuah gagasan positif dari pemerintah Indonesia yang menjadi bentuk penghargaan terhadap sejarah peradaban Papua di Mansinam. Patung ini selesai pada tahun 2014 dan berdiri sangat megah serta penuh wibawa. Dengan tangan yang terbuka,



Yesus Kristus ibaratnya penuh kasih menerima siapapun yang berkunjung ke Mansinam.

Wisata religi yang dipenuhi nilai-nilai sejarah ke Pulau Mansinam akan menjadi sangat luar biasa setelah kita melihat langsung berbagai bukti peninggalan awal berdirinya peradaban modern di tanah Papua.

Sangat tidak lengkap, apabila berkunjung ke Manokwari namun belum datang ke pulau ini. Pulau Mansinam adalah sebuah pulau wisata penuh sejarah dan sarat akan nilai-nilai religius.

• es

Bambang Soesatyo: Jaga Keseimbangan Hidup dengan Otomotif

Wakil rakyat memiliki sederet aktivitas yang terbilang begitu padat, maka tentunya wakil rakyat yang juga sebagai manusia biasa selalu dituntut membutuhkan konsentrasi penuh dalam menjalankan setiap kegiatan amanah dalam mengawal kebijakan pemerintah.



Tak dapat dipungkiri, sebagai manusia biasa tersebut acapkali kejenuhan melanda. Maka, dibutuhkan berbagai aktivitas dan kegiatan selingan untuk kembali memulihkan pikiran dari rutinitas.

Tujuannya, agar dalam menjalankan tugas sehari-hari tetap prima dalam menjalankan amanah konstitusi. Bagi seorang legislator Bambang Soesatyo, otomotif adalah hobi yang bisa membuat keseimbangan hidup. Ketertarikannya dengan dunia otomotif sudah ada sejak muda. “Motor pertama saya adalah Yamaha 80 yang didapat sebagai hadiah khitan saat kecil,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi saat ditemui **Parlementaria**, di kantor Pengurus Pusat IMI, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, akhir Oktober lalu.

Hobi otomotif, menurut Bamsoet bermanfaat dalam membangun jaringan. Bamsoet mengungkapkan, dirinya ikut tergabung ke dalam berbagai macam komunitas, salah satunya organisasi Ikatan Motor

Indonesia (IMI). Dalam komunitas IMI tersebut, Bamsoet bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru. Bahkan, Bamsoet pada periode 2021-2024 terpilih sebagai Ketua Umum IMI.

IMI dibawah komando kepemimpinan Bamsoet mengembangkan motor listrik bernama Bike Smart (BS) Elektrik. “Karena tidak perlu pusing antri beli bensin. Memang sekarang ini bagi saya pilihan yang tepat. Jarak tempuh motor listrik BS bisa mencapai 45 km sekali isi baterai. Kebutuhan *charging*-nya tidak terlalu memakan waktu, cukup 6-8 jam baterai sudah terisi penuh. Jadi bisa diisi malam hari, pagi harinya bisa digunakan kembali untuk menunjang aktivitas hobi,” tuturnya.

Bamsoet yang tercatat dalam keanggotaan Komisi III DPR RI ini pun berpesan kepada masyarakat untuk tak ragu menekuni hobi motor listrik yang memiliki multi-efek positif terhadap sekitar seperti kelestarian alam dan perkembangan ekonomi nasional dimana BS Elektrik memiliki 60 persen komponen kandungan berasal dari dalam negeri. Melalui hobi motor listrik, masyarakat diharapkan turut terlibat

dalam kampanye menjaga lingkungan dari pencemaran polusi udara.

Menurut Bamsoet, sudah waktunya masyarakat Indonesia bermigrasi menggunakan kendaraan bermotor listrik. Perawatan rendah, subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lainnya, serta polusi udara menurun. Jika tidak digencarkan sejak dini, Indonesia bisa tertinggal dari negara maju lainnya.

“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar, melainkan juga harus mengambil bagian dalam memproduksi dan mengembangkan kendaraan listrik, khususnya untuk segmen motor listrik. Kehadiran motor BS Elektrik yang dipelopori oleh IMI, diharapkan bisa menjadi pemantik menyemarakkan gairah industri kendaraan listrik di Indonesia,” pungkas Bamsoet. ● pun/es

Pengunjung 'Grasberg' Wajib Lolos Cek Kesehatan



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI saat mengunjungi area tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Dev/nvl

Ada prosedur keselamatan dan kesehatan yang diberlakukan bagi pengunjung yang akan mendatangi area tambang Grasberg PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Selain wajib menggunakan alat keselamatan standar seperti helm, sepatu boot, rompi dan sarung tangan, pengunjung juga harus menjalani tes kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan itulah diputuskan boleh atau tidaknya seseorang untuk bisa ke Grasberg yang lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut.

Saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Freeport Indonesia beberapa waktu lalu, semua prosedur keselamatan dan kesehatan tersebut juga diterapkan tanpa terkecuali. Satu demi satu anggota rombongan di tes kesehatannya, mulai dari cek tensi darah, saturasi oksigen, hingga swab antigen. Dari seluruh anggota tim rombongan, hanya ada satu peserta yang tidak bisa lanjut mengikuti kegiatan naik ke Grasberg dan masuk ke lubang tambang karena tidak lolos tes kesehatannya.

Setelah menempuh jalan terjal dan curam, tim akhirnya tiba di Grasberg. Suhu udara dingin serta tipisnya oksigen yang atas ketinggian 4.200 mdpl bisa berdampak pada kondisi kesehatan pengunjung meskipun sebelumnya telah lolos tes kesehatan. Perubahan kondisi kesehatan ini dialami juga oleh beberapa peserta tim kunjungan kerja Komisi VII DPR saat berada di Grasberg. Salah satunya seperti yang dialami Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang setelah dicek oleh tim kesehatan, ternyata saturasi oksigen ditubuhnya turun di bawah normal.

Padahal dalam tes kesehatan sebelum melakukan perjalanan, saturasi oksigen Maman dinyatakan dalam kondisi yang sangat baik.

Selain Maman, peserta lain ada juga yang mengalami penurunan saturasi oksigen. Biasanya gejala yang dirasakan adalah kepala agak pusing dan sempoyongan. Mengatasi hal tersebut, tim kesehatan PT Freeport segera mengambil langkah sigap dengan memberikan bantuan oksigen kepada peserta yang mengalami penurunan saturasi oksigen.

Terlalu banyak melakukan gerakan di daerah yang kadar oksigennya tipis juga bisa menjadi penyebab seseorang merasa pusing. Untuk itu peserta tim kunjungan diimbau untuk tidak terlalu banyak melakukan gerakan yang bisa melelahkan dan bisa berdampak pada kondisi kesehatan yang tidak baik. Usai mendapat penanganan tim medis, kondisi peserta kembali fit dan bugar dan dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya yakni menuju area lubang tambang bawah tanah Freeport.

Industri pertambangan emas dan tembaga di Papua ini di klaim sebagai yang terbesar di dunia. Kedalaman tambang Grasberg mencapai 1.000 meter dan berdiameter 3,9 km. Untuk menjaga keselamatan pengunjung yang akan menuju ke area penambangan dari ancaman kelompok kriminal bersenjata, Freeport menyiapkan bus anti peluru. Perjalanan untuk sampai ke area tambang menggunakan bus membutuhkan waktu kurang lebih dua jam. Selama perjalanan pengunjung akan dikawal secara ketat oleh aparat polisi bersenjata demi menghindari kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. ●dep/es



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG HORISBANG



LODEWIJK F. PAULUS
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPRI



A. MUHAMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KOREKASIA

Selamat Hari Sumpah Pemuda

28 Oktober 2021

"Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku bertumpah darah yang satu,
Tanah Air Indonesia."

"Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu,
Bangsa Indonesia."

"Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia"



@ DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



@ DPR_RI



DPR RI